

PENELITIAN

Kajian Perkembangan Tahapan Mengglobal Kota Kuta Bali

Oleh :
Ari Djatmiko



JURUSAN TEKNIK PLANOLOGI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Penelitian Terdahulu	9
1.4 Obyek dan Konteks Penelitian	10
1.5 Tujuan dan Sasaran	11
1.5.1 Tujuan	11
1.5.2 Sasaran	11
BAB II Gambaran Umum Wilayah Penelitian	14
2.1 Kondisi Umum Wilayah Kuta.....	14
2.2 Sejarah Dan Perkembangan Kepariwisata Kuta	25
2.2.1 Kuta Sebelum Kemerdekaan.....	25
2.2.2 Tumbuhnya Turisme Kuta Setelah Masa Kemerdekaan.....	28
2.2.3 Masa Pengembangan Kawasan Turistik Kuta.....	29
2.2.4 Perkembangan Kuta Kearah Kapitalistik	30
2.3 Hubungan Sosial-Geografi kelurahan Dan Desa Adat Kuta	32
2.4 Kondisi Sosial Ekonomi Kuta	33
2.5 Kondisi Sosial Budaya	34
BAB III Kesimpulan	43
3.1 Kesimpulan	43

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Pengkajian Budaya dan Ruang Menurut beberapa Ahli	8
Tabel I.2 Perubahan Budaya Dan Ruang Permukiman Konteks Indonesia.....	9
Tabel II.1 Nama Pura, Banjar, Pangempon, dan Anggota	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Pemanfaatan Ruang Kecamatan Kuta	17
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman nilai-nilai lokal. Namun karena bersaing dengan budaya luar, nilai-nilai kearifan budaya lokal tersebut semakin memudar. Budaya luar mempersempit ruang gerak tradisi lokal dan sistem keberagaman yang ada. Lebih lanjut kearifan budaya lokal bukan hanya kehilangan makna dan saling berebut peran, tetapi juga kehilangan kekuatan dan daya juangnya saat peran Negara melemah (Mulkham, 2006).

Keterpurukan budaya dan nilai-nilai lokal mempengaruhi keberadaan komunitas pada masa mendatang. Komitmen pelaku pembangunan serta dukungan birokrasi dalam menyediakan ruang kreatif bagi rakyat dapat menjaga kearifan budaya lokal yang alamiah dan sesuai dengan adat kebiasaan lokal (Abdullah, 2001). Kearifan tradisi lokal dalam mengambil peran kreatif dapat berfungsi produktif bagi pemecahan problem aktual berhubungan dengan alam dan dunia global (Mulkham, 2006)

Berdasarkan wujud atau bentuknya, kebudayaan terdiri atas bentuk abstrak hingga bentuk kasat. Dijelaskan lebih lanjut oleh JJ. Honigman dalam Koentjaraningrat (2005) bahwa wujud kebudayaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem kebudayaan (*cultural system*) seperti nilai atau pandangan hidup yang bersifat abstrak, sistem sosial (*social system*) seperti pola kegiatan yang bersifat konkrit, dan kebudayaan fisik (*physical culture*) berupa peralatan, perabot, dan bangunan yang bersifat sangat konkrit. Setiap bentuk kebudayaan saling berkaitan satu sama lain dan memiliki unsur-unsur yang dikategorikan dalam tujuh unsur kebudayaan. Tujuh unsur kebudayaan tersebut adalah sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem teknologi (Kluckhohn dalam Koentjaraningrat, 2005). Ketujuh unsur budaya tersebut merujuk pada tema kebudayaan yang bersifat universal. Artinya, ketujuh unsur tersebut selalu ada pada kebudayaan meskipun berbeda setiap komposisinya. Perbedaan inilah yang akan membuat ciri khas pada suatu kebudayaan.

Menurut Babu dan Kuttiah (1996: 5-6), budaya mempunyai ruang lingkup yang relatif luas, seperti mencakup lingkungan fisik permukiman atau buatan manusia lainnya. Perwujudan

budaya dalam wujud fisik dan lingkungan binaan menunjukkan keragaman pada berbagai lingkungan. Ruang permukiman sebagai salah satu contoh cerminan budaya lokal yang menunjukkan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Selain itu menurut Levi Strauss (1963: 121), struktur sosial masyarakat sebagai salah satu wujud budaya yang mempengaruhi terbentuknya ruang permukiman. Levi Strauss, (1963: 141-143) menambahkan bahwa struktur sosial masyarakat diwujudkan dalam oposisi binair, seperti menggambarkan posisi laki-laki-perempuan, anak-dewasa, pusat-pinggiran. Salah satu contohnya adalah permukiman di Bororo, bagian pusat diperuntukkan laki-laki serta berbagai upacara ritual. Sedangkan, bagian pinggiran untuk perempuan (Levi Strauss, 1963: 141-143).

Budaya sebagai sebuah sistem selalu mengalami perubahan dan perkembangan melalui dorongan-dorongan dari dalam maupun dari luar sistem tersebut. Dengan perubahan tersebut, masa dan kesejarahan menjadi faktor yang perlu diperhitungkan. Perubahan budaya tersebut terjadi karena terdapatnya proses adaptasi dan belajar manusia, yang menuju pada tataran serta tuntutan yang lebih baik.

Perubahan budaya dapat mempengaruhi perubahan pola dan struktur permukiman wilayah (Maran, 2000; Lauer, 2003; Suparlan 1977). Rapoport (1968) mengungkapkan bahwa perubahan tidak selalu terjadi serentak dan pada seluruh unsur yang ada. Terdapat unsur yang berubah dan unsur yang tetap atau bertahan (*constancy and change*) pada nilai *sacred* dan *profane*. Juga terdapatnya perubahan masih menyisakan unsur yang dipertahankan, hanya umumnya terdapat kecenderungan lebih kuat untuk berubah daripada mempertahankannya. Sedangkan Levi Straus (1963) mengungkapkan bahwa hubungan budaya dan struktur permukiman relatif menghasilkan struktur dalam yang tetap dan tidak berubah.

Sistem kepercayaan telah mempengaruhi terbentuknya pola dan hirarki permukiman. Parimin (1986:140) menyatakan bahwa sistem permukiman sebagai pengejawantahan sistem kepercayaan dapat mengandung unsur *sacred-profane*. Dijelaskan lebih lanjut oleh Dovey (1979) bahwa unsur *sacred* adalah unsur yang harus dipelihara dan dipertahankan, sedangkan unsur *profane* adalah unsur yang memungkinkan untuk diubah. Begitu juga dengan Parimin (1986:140-144) yang menyatakan bahwa unsur *sacred* pada konteks Bali diwujudkan sebagai unsur utama yakni gunung, dan unsur *profane* diwujudkan sebagai unsur nista yakni laut. Demikian juga, menurut pandangan Rapoport yang mengkritisi unsur tersebut khususnya pada

unsur *sacred*. Dalam konteks perubahan, unsur *sacred* cenderung lebih dipertahankan daripada upaya untuk mengubahnya.

Pemikiran yang bersifat oposisi binair, seperti pusat dan pinggiran. Kasus yang terjadi di Bali diuraikan berdasarkan kondisi sosial kemasyarakatan. Apabila dikaitkan dengan pemikiran Derrida (Hart, 2003: 76; Agger, 2003:119), terdapat perubahan pandangan bahwa masyarakat Bali pegunungan berkedudukan lebih rendah daripada masyarakat Bali dataran yang lebih banyak mendapat pengaruh Hindu. Seperti pemikiran yang diungkapkan oleh Lyotard (dalam Barker, 2005:196), alam pikiran modern yang menempatkan Hindu sebagai metanarasi sudah kurang relevan pada era *postmodern* saat ini. Menurut Lyotard, alam pikiran modern yang mendasarkan diri pada ketertarikannya terhadap metanarasi adalah kisah-kisah sejarah yang agung dan memiliki validitas universal. Sedangkan, meyakini pengetahuan yang bersifat spesifik terhadap permainan bahasa dan merangkul banyak pengetahuan lokal yang plural dan beragam adalah kondisi *postmodern*. Dengan demikian, sesuai dengan alam pikiran *postmodern* penelitian tentang ragam budaya pada aras lokal menjadi sesuatu yang cukup signifikan pada era globalisasi.

Perubahan ruang sebagai bagian dari perubahan budaya dapat terjadi akibat dominasi ekonomi (Jackson, 1991b dan 2000b; Su, 2007). Lebih lanjut diungkapkan bahwa perubahan ruang dipengaruhi beragamnya kekuatan yang bekerja pada ruang bersangkutan. Sandercock menilai ruang sebagai “*rainbow region*”, yaitu wilayah dengan berbagai kepentingan. Hal yang terjadi dalam wilayah itu dapat berupa perebutan ruang (*struggle over space*), seperti perebutan wilayah hidup dengan wilayah ekonomi (Friedmann, 1987). Selain itu, terdapat pula perebutan kepemilikan (*belonging*). Menurut Sandercock (1998:3), di wilayah tersebut akan timbul permasalahan seperti, ‘*who belongs where?*’ dan *with what citizenship rights?* (dengan hak kewargaan apa?). Begitu juga dengan Swyngedouw (2010) yang menambahkan beberapa pertanyaan, seperti “*who gains from and who pay for, who benefits from and who suffers from and in what ways?*”

Henri Lefebvre (1991) dan Manuel Castells (1996) mengungkapkan bahwa ruang merupakan *social production* yang terbentuk dari adanya kekuatan relasional antara kapital (*economic oriented*) & *political power*. Lefebvre (1991) mengungkapkan pula bahwa keberadaan ruang absolut sebagai bentuk relasi sosial yang terjadi. Terdapat beberapa pandangan tentang relasi antar faktor pembentuk ruang yakni faktor politik-ekonomi (Harvey, 1989; Fanstein,

2005), politik-ekologi (Swyngedouw dan Heynen, 2003; Latour, 2004; Murdoch, 2006), dan sosial budaya (Sandercock, 1998). Graham dan Healey (1999) mengungkapkan ajakan untuk mempraktekkan proses perencanaan secara relasional. Sedangkan Friedman (1998) mengungkapkan produksi habitat kota yang dipengaruhi 6 proses sosio spasial, salah satunya berupa perubahan dan diferensiasi kultural.

Murdoch (2006) mengungkapkan pula bahwa ruang menjadi “tempat pertemuan” konflik relasional setelah relasi konsensual berhasil dikonsolidasikan. Perspektif ruang relasional memungkinkan untuk mengetahui cara konfigurasi ruang tertentu dibangkitkan dan mengetahui alasan ruang tertentu tidak pernah muncul atau himpunan relasinya gagal mendapatkan koherensi ruang (*spatial coherence*). Oleh karena itu, relasi antar relasi menjadi hal yang penting. Bentuk ruang dapat dilihat sebagai “ekspresi” relasi yang “mendasarinya”, tetapi dapat juga dilihat sebagai bentuk penindasan terhadap semua hubungan lain yang mungkin sebelumnya pernah ada yang 'menghilang eksistensinya'. Pembuatan ruang secara relasional merupakan proses kesepakatan (*consensual*) atau pertentangan (*contested*). Dapat dikatakan bahwa “*consensual*” karena relasi dibuat melalui persetujuan atau penyesuaian antara 2 entitas atau lebih, sedangkan “*contested*” karena konstruksi satu set relasi mencakup baik pengeluaran (*exclusion*) beberapa entitas dan relasinya atau melalui pemaksaan keikutsertaan pihak lainnya dengan kekerasan. Dengan demikian, ruang relasional merupakan ruang yang diisi oleh *power* yang sebagian relasi berhasil mendominasi, minimal untuk beberapa waktu sedangkan lainnya didominasi. Oleh karena itu, beragam himpunan relasi dapat eksis bersama. Tetapi, biasanya terjadi kompetisi diantara relasi tersebut terhadap komposisi ruang dan tempat tertentu.

Selain dipengaruhi dominasi ekonomi, terdapat pula pandangan tentang pengaruh struktur dan agen dalam perubahan ruang. Marxians dan kaum fungsionalists yang diungkapkan antara lain oleh Soja & Harvey, memandang struktur sebagai penentu utama terjadinya relasi-relasi sosial dalam ruang.. Tetapi Giddens sebagai seorang neo-Weberian, tidak seperti kaum *strukturalists*. Giddens tidak mengabaikan peran seorang agent/agents. Baginya terbentuknya suatu struktur dalam masyarakat, merupakan hasil produksi dan reproduksi antar *agents* dalam suatu komunitas. Lebih lanjut Giddens dan Wirotomo menggunakan kekuatan struktural dari para aktor pemerintah kota. Giddens menggunakan *structural relations*, dan Wirotomo menggunakan *prosedural processes, cultural and structural processes*. Melalui proses inilah dilakukan negosiasi-negosiasi antar agents/actors. Sebagai contoh *social cohesion* yang

dibangun, antara orang-orang Cina dengan penduduk lokal di Makassar, tidak begitu mudah dan cepat tapi melalui proses waktu dimulai sejak pemerintahan kerajaan Makassar sampai sekarang. *Social cohesion* yang terjalin didasarkan dan membentuk *trust* diantara mereka,

Dari sisi perencanaan sebagai bentuk intervensi mempertahankan ruang lokal, Allmendinger (2001) mengungkapkan bahwa teori perencanaan juga memperlihatkan pergeseran paradigma yakni dari *instrumental rationality* ke *communicative rationality*. Pergeseran ini sebagai wujud pemahaman kegagalan perencanaan yang cenderung *top down* dalam mengantisipasi kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, muncul paradigma perencanaan yang lebih mengutamakan pengembangan lokal (*local development*) sebagai wacana alternatif dalam menyelesaikan konflik ketimpangan antar wilayah, kesenjangan kesejahteraan, rasa keadilan, dan persoalan sosial ekonomi kemasyarakatan lainnya dalam peningkatan kinerja pengembangan (Nurzaman, 2002).

Perencanaan tidak hanya sebagai penghormatan terhadap masalah memodernisasikan masyarakat tradisional, tidak hanya duplikasi intensifikasi energi dan sumberdaya alam, dan bukan lagi pembangunan yang terpisah dari pembangunan masyarakat (Abdullah, 2001). Perencanaan pembangunan seyogyanya mengakui dan melibatkan keadaan lokal, menumbuhkan potensi perkembangan serta membuka akses kontribusi institusi dan pengetahuan lokal (Kay and Alder, 1999).

Sudaryono (2006) mengusulkan perlunya pertimbangan pluralisme budaya lokal dalam konteks perencanaan keruangan. Pendekatan keruangan yang selama ini bersifat deterministik-rasionalistik telah banyak menuai kritik, khususnya karena ketidakmampuan mengakomodasi nilai-nilai pluralisme dan kepentingan masyarakat banyak pada skala komunitas dan lokal. Oleh karena itu, Sudaryono (2006) mengungkapkan perhatiannya terhadap konsep penguatan ruang lokal sebagai bentuk dukungan mempertahankan keberadaan ruang lokal.

Dari uraian tersebut, penguatan ruang lokal dalam konteks perencanaan merupakan hal yang penting. Melalui penguatan ini, budaya lokal yang memuat norma, sosial, dan artefak dapat terus bertahan di tengah intervensi berbagai budaya luar yang relatif mendominasi. Dapat dikatakan bahwa posisi kerja perencanaan keruangan menjadi sangat penting dan signifikan, dengan tugas sucinya membangun kesadaran budaya, ruang, dan politik lokal bagi masyarakat lokal khususnya dan masyarakat dunia yang menaruh kepentingan terhadap keberlanjutan sumberdaya lokal.

Pengaruh budaya luar terhadap komunitas lokal semakin meningkat pada era globalisasi. Pada era globalisasi, mekanisme yang timbul bertumpu pada kekuatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi tersebut berupa wisata yang menunjukkan kecenderungan perkembangan relatif pesat. Wisata merupakan salah satu kegiatan yang mendapat pengaruh globalisasi, yang terwujud dalam industri wisata (Shaw dan William, 2002). Keterkaitan antar lokasi menjadi pendorong perkembangan wisata internasional, termasuk wisatawan asing (Tribe, 1997; Youell, 1998). Cochrane dan Nyeri (2000), dorongan globalisasi mempengaruhi peningkatan *interaksi host-guest* di tingkat lokal.

Dalam konteks pengembangan kegiatan wisata, terdapat relasi antara dominasi ekonomi dan resistensi nilai lokal. Dominasi ekonomi tidak hanya ekonomi yang digerakkan oleh pelaku luar negeri sebagai pengaruh globalisasi, tetapi juga oleh pelaku nasional dan lokal wilayah. Lauer (2003) menambahkan bahwa perubahan terjadi akibat kontradiksi antara kekuatan yang berlawanan (bersifat statis dan dinamis) serta dipersatukan dalam masyarakat. Su (2007) berpandangan bahwa pengembangan wisata menempatkan ekonomi dan budaya dalam satu analisis yang tidak bisa dipisahkan.

Oleh karena itu, ruang pariwisata merupakan media dan hasil dari dua jalinan kekuatan produksi dan konsumsi yang memungkinkan menimbulkan ketegangan sosial-politik dalam pengembangan pariwisata. (Lefebvre 1991: 365). Ateljevic (2000) berpendapat bahwa politik pariwisata dapat disamakan dengan sirkuit yang melibatkan interaksi antara produsen dan konsumen. Ruang pariwisata memiliki alasan mendorong kompromi antara semua yang terlibat. (Aike P. Rots, 2014) Ruang suci sebagai *Thirdspace Sacralisation, Power*, dan peruntukan ruang. 'Ruang suci' telah lama merupakan salah satu kategori inti dari disiplin akademis dikenal berbagai sebagai 'studi agama', 'studi agama (s)' atau 'perbandingan agama'. Itu adalah pusat karya ulama seperti Émile Durkheim (1858-1917) dan Mircea Eliade (1907-1986), yang teori sangat dipengaruhi lapangan dan menikmati status yang paradigmatik sampai saat ini. Dengan demikian, gagasan tentang 'ruang suci', 'tempat suci' dan 'situs suci' telah digunakan secara luas dalam studi agama teks. Itu tidak berarti, bagaimanapun, bahwa ada banyak refleksi ilmiah tentang berbagai faktor sosial, ideologi dan lingkungan yang tersirat dalam pembangunan ini 'situs suci'-pertanyaan, secara singkat, bagaimana 'kesucian' diproduksi dan dinegosiasikan. Meskipun mungkin benar bahwa 'penyelidikan spasialitas dan agama memiliki sejarah panjang' (Corrigan 2009:157), adalah sama benar bahwa kebanyakan studi ruang sakral yang dihasilkan

dalam bidang studi agama fokus pada sejarah dan makna simbolis dari 'situs agama' tertentu, tetapi tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain dari spasialitas seperti konstruksi lanskap, praktek tata ruang, nilai tanah, dan teritorial dan identitas politik (lih Knott 2005: 2). Dengan demikian, meskipun wacana yang cukup besar di 'tempat suci', sampai saat ini telah ada refleksi kritis sangat kecil di cara di mana tempat-tempat yang dibangun, diperebutkan dan berubah - yaitu, pada proses dasarnya politik sacralisation, de- dan resacralisation.

Teori Lefebvre pada produksi ruang dapat membangun hubungan yang diperlukan antara dominasi/resistensi dan hasil sosio-spasial. Lefebvre menambahkan pula bahwa , konstelasi kekuasaan biasanya diuraikan melalui sistem spasial pelibatan (inklusi) dan pengecualian (eksklusi), menurut bagaimana hal itu dirasakan, dipahami dan dihayati oleh berbagai pelaku pada lokasi dimaksud (Teo dan Leong 2006). Oleh karena itu, kerangka kerja yang dibentuk perlu mempertimbangkan keterkaitan ruang dan hubungan kekuasaan. Ada tiga jenis ruang yang terjadi dan berkontribusi pada produksi ruang abstrak (ruang sosial) dalam ruang mutlak (ruang fisik) yakni representasi ruang, praktek tata ruang dan ruang representasional (Lefebvre 1991).

Representasi ruang mengacu pada ruang yang dikonsep "Ruang yang dominan di masyarakat manapun" (Lefebvre 1991:39). Simbol yang mengandung dan kode yang mewujudkan predilections ideologis yang kuat, mereka dibangun oleh negara, profesional dan teknokrat untuk membangun tatanan hegemonik. Spasial praktek mengacu pada proses yang orang melihat, menggunakan dan menghasilkan ruang. Karena hal-hal tersebut adalah praktek, orang memikul tanggung jawab untuk ruang sosial yang mereka buat. Oleh karena rutinitas sehari-hari dan kegiatan yang dilakukan berkontribusi ruang representasional yang merupakan ranah pengalaman yang "langsung hidup" oleh penduduknya dan pengguna (Lefebvre, 1991:39). Karena mereka diukir dan dihuni oleh kelompok mereka mewakili, mereka adalah ruang yang signifikan untuk penduduk tapi jejak representasi, ideologi dan kekuasaan (yaitu, ruang representasi) akan tetap mencoba untuk membuat tanda terhadap ruang representasional. Teori Lefebvre mengenai produksi ruang memungkinkan untuk menganalisis lebih mendalam tentang representasi dan hegemoni yang inheren tertanam di ruang sehari-hari. Teori Lefebvre ini kurang memberikan perhatian yang cukup untuk 'konsumsi' sebagai kekhususan praktik spasial penting bagaimana ruang representasional dibangun. Konsumsi memungkinkan orang untuk mengevaluasi sistem representasi dan hegemoni dan mempengaruhi proses yang mereka gunakan dan bangkitkan ruang. Bahkan, dengan sendirinya, konsumsi dapat sebagai perlawanan terhadap

perintah hegemonik. Oleh karena itu, dalam mengeksplorasi politik budaya ruang pariwisata, perlu mengeksplorasi lebih lengkap, praktik spasial yang bertanggung jawab atas produksi ruang pariwisata sebagai ruang representasi atau ruang representasional.

Selama ini masih terbatas penjelasan empirik tentang perubahan dan keberlanjutan ruang lokal pada dari perspektif ruang relasional akibat perkembangan wisata dalam konteks perencanaan tata ruang. Penelitian-penelitian yang ada selama ini umumnya kurang mempertimbangkan pemahaman ruang yang diantaranya adalah:

- Budaya *sacred profane*: wujud ruang desa adat, sistem kepercayaan/religi vs Dinamis wisata, global,
- Perubahan Ruang,
- Intervensi : perencanaan : usaha stakeholder

Selain itu wisata akibat pengaruh globalisasi, sakralitas dan perencanaan, serta aspek-aspek yang mempengaruhinya. Beberapa literatur perencanaan terkait belum memberikan penjelasan yang memadai tentang keberlanjutan dan perubahan ruang yang terjadi serta perkembangan aspek yang mempengaruhinya, antara lain Sandercock (1998), Lefebvre (1991), kasus plta M yasin dll. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperjelas perspektif relasi global dan lokal serta wujud ruangnya dalam konteks wisata, yakni apakah perspektif kekalahan, kemunculan atau perspektif adanya kontestasi global dan lokal.

1.2 Perumusan Masalah

Pengkajian budaya dan ruang kawasan perkotaan yang menunjukkan relasi dominasi wisata dan resistensi sakralitas relatif masih terbatas, yakni:

TABEL I.1
Pengkajian Budaya dan Ruang Kawasan Perkotaan

NO	PENULIS	MUATAN
1	Douglas, 2007	Pembentukan kota baru non wisata dengan melibatkan aktor asing dan pemerintah. Belum membahas kegiatan wisata.
2	Sandercock, 1998	Pertimbangan sosial budaya antara lain peran <i>indigenous people</i> dalam pembentukan ruang. Belum mengkaitkan relasi globalisasi, wisata dan budaya.
3	Sowanne, 2009	Pemahaman tempat dan ruang sakral konteks wilayah Budha Thailand. Belum mengkaitkan globalisasi dan wisata.
4	Olson, 2008	Kontestasi sacred place antar aktor termasuk antar jemaat dalam

		penggunaan Temple Square di Salt Lake Utah. Belum mengkaitkan globalisasi dan perkembangan wisata.
5	Linenthal, 1995	Pembahasan konsepsi ruang sakral secara umum untuk konteks Amerika
6	Van Kempen, 2000	Perkembangan ruang kota global dan mengglobal dengan basis non wisata.
7	Mc Ewan, 2000	Perkembangan Birmingham serta faktor-faktor pendorong nya berupa kegiatan wisata lokal. Belum mengkaji perubahan ruangnya.
8	Lefebvre, 1991	Relasi aktor dalam memproduksi ruang. Belum mengeksplorasi mendalam ruang absolut (termasuk ruang sakral) dalam kaitan pengaruh wisata.
9	Lin, 2008	Atraksi kultural di Miami dipengaruhi globalisasi. Belum melihat perubahan ruang yang terjadi.
10	Xiao 2007	Relasi global lokal dalam pengembangan wisata Dalian Cina. Belum melihat perubahan ruang yang terjadi.
11	Sari, 2010	Perkembangan wisata di Konya Turki yang dipengaruhi globalisasi. Belum melihat perubahan ruang yang terjadi.
12	Otzurk, 2008	Relasi global lokal dalam pengembangan wisata di Antalya Turki. Belum melihat perubahan ruang yang terjadi.

Sumber: dikutip dari beberapa ahli

1.3 Penelitian Terdahulu Tentang Perubahan Budaya dan Ruang Permukiman Konteks Indonesia

Penelitian terdahulu tentang Perubahan Budaya dan Ruang Permukiman konteks Indonesia Cenderung lingkup pada masa bangunan, fokus pada satu aspek saja (misal pendapatan, *biokultural diversity*), memandang entitas secara umum/keseluruhan), serta tidak memperdalam keruangan yang terjadi dalam konteks perubahan budaya. Berikut beberapa temuan dari para peneliti diantaranya adalah:

Tabel I.2
Perubahan Budaya dan Ruang Permukiman Konteks Indonesia

NO	PENELITI	TOPIK/TEMUAN
1	Adi, 1992	Perubahan dalam bangunan rumah di Bali
2	Dawson dan Gillow (1994)	Perubahan arsitektur tradisional Bali akibat perkembangan wisata
3	Giesen (1992)	Perkembangan wisata di wilayah pedesaan (kasus Ubud).
4	Mac Rae (1999)	Keterkaitan antara upacara dan jasa wisata (di Ubud)
5	Sutjipta (2004)	Kajian sisi negatif wisata di Pulau Bali
6	Gde Agung (2006)	Erosi kebudayaan bali pada pada semua unsur
7	Parimin (1986)	Sosio religiis pada beberapa desa di Bali

8	Adyana (2003)	Perubahan fungsi lahan desa adat Padangsambian, Bali
9	Runa (2004)	Tata spasial permukiman desa Tenangan, pegunungan di Bali
10	Sasongko, 2006	Konsepsi pembentukan ruang permukiman berbasis budaya ritual di Lombok Tengah
11	Nuraini, 2004	Pembentukan tata spasial desa suku batak mandailing dan faktor pengaruhnya berupa kosmologi lokal, religi lokal dan kondisi fisik lokal.
12	Rimadewi Supriharjo (2004)	Pembentukan pola keruangan berhirarki di kawasan Ampel Surabaya berdasarkan nilai ruang yang khas.
13	Edi Purwanto (2007)	Penentuan sistem nilai guyub yang mendasari perilaku meruang para pelaku ruang kota pada poros Tugu Pal Putih sampai dengan Alun-alun Utara di kota Yogyakarta,
14	Djarot Purbadi (2010)	Kajian teori sosio-spiritual spasial sebagai landasan bagi arsitektur permukiman di desa Kaenbaun Pulau Timor.
15	Suastiwi Triatmodjo (2010)	Rumusan eksistensial permukiman di Kauman yang didasari sistem kepercayaan, nilai dan kegiatan,.

Sumber: dikutip dari beberapa ahli

Pada penelitian terkait lainnya juga belum memperdalam aspek perubahan ruang dalam konteks perubahan budaya, tetapi lebih berfokus pada faktor-faktor sosial pembentuk ruang lokal.

1.4 Obyek dan Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya. Juga menunjukkan terjadinya dinamika dan pengaruh globalisasi. Salah satu yang menunjukkan adalah di Pulau Bali.

- Desa Adat merupakan kesatuan sosial dan masyarakat dalam lingkup administratif .
- Industri wisata (internasional) sebagai salah satu industri dengan perkembangan tercepat dalam era global kontemporer (Sinichi, 2001; Peric, 2005; Rotariu, 2007; Mpofu, 2009)

Berdasarkan tradisi dominan yang menjadi ciri desa adat atau pakraman di Bali, maka dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe (Swellengerebel, 1960; Danandjaja, 1980; MPLA, 1991 dan Reuter, 2005), yaitu: *Desa Bali Aga*, *Desa Apanage* dan *Desa Anyar*. Selain itu terdapat enam tipologi desa yang didasarkan pada topografis dan tingkat diferensiasi sosial dan pluralitas masyarakatnya, yaitu: desa pegunungan (homogen dan heterogen), desa dataran (homogen dan heterogen), dan desa pesisir (homogen dan heterogen). Keenam tipologi desa itu berada didalam

lima lingkaran kebudayaan Bali, masing-masing Bali Utara (Buleleng), Bali Timur (Klungkung, Karangasem), Bali Selatan (Badung, Denpasar), Bali Barat (Jembrana, Tabanan) dan Bali Tengah (Gianyar, Bangli). Menurut Geriya (2000:34-35) pembagian lingkaran kebudayaan itu didasarkan pada struktur dasar, adaptasi ekologi, gelombang pengaruh luar dan komunikasi global, serta kesinambungan tradisi dalam modernisasi. Kawasan Kuta sebagai lokasi kajian diperkuat pula dengan kekhasan wilayah nya yang diprioritaskan untuk pengembangan industri wisata massal yang memungkinkan kecenderungan perubahan budaya dan ruang lokal nya.

1.5 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.5.1 Tujuan

Berdasarkan keterbatasan konsep dan studi sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah memahami perubahan keruangan dalam konteks perubahan budaya desa adat akibat perkembangan wisata global. Dalam pembahasan perubahan tersebut tidak lepas dari konteks konsep kearifan lokal (*lokal knowledge*) Bali, yaitu *Tri Hita Karana* yang berhubungan dengan aspek *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan*.

1.5.2 Sasaran

Adapun sasaran dalam penelitian ini yakni :

- Memahami perubahan budaya dan spasial terkait dengan aspek *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* di desa adat Kuta
- Memahami pola, arah, makna dan dampak perubahan budaya dan spasial serta relevansinya terhadap perkembangan wilayah pada masa mendatang.
- Memahami faktor-faktor pengaruh perubahan spasial baik eksternal yakni dukungan pemerintah dan pengusaha maupun internal yakni sosial dan budaya masyarakat lokal.

Beberapa dekade terakhir ini globalisasi melalui perubahan pada laju dinamika lingkungan telah mendorong percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi ini mendorong dapat diketahuinya kondisi wilayah secara lebih mudah dan cepat melalui teknologi komunikasi dan informasi. Demikian pula kondisi antar wilayah dengan adanya temuan dari bidang teknologi transportasi tersebut pun bukan menjadi suatu kendala. Lebih jauh diungkapkan bahwa budaya global menyangkut hubungan-hubungan di antara lima

dimensi, yaitu *ethnoscape* (pergerakan manusia), *mediascape* (pergerakan media massa), *technoscape* (pergerakan teknologi), *finanscape* (pergerakan uang), dan *ideoscape* (pergerakan ideologi), seperti menurut Arjun Appadurai (dalam Featherstone, ed., 1993).

Berbagai aspek kehidupan telah mendapat pengaruh globalisasi, khususnya melalui relasi sumberdaya (orang, modal, dan informasi) yang mendorong perkembangan manifestasi hubungan antara negara, lembaga, kelompok dan individu (Aina, 1996). Selain itu, melalui teknologi informasi yang menggabungkan kemajuan dalam komputasi, elektronik, dan telekomunikasi mendorong terdapatnya integrasi ekonomi nasional dengan sistem ekonomi internasional (Kwanashie, 1999:17). Selain itu, perdagangan dan keuangan internasional, mobilitas antar-negara serta komunikasi melalui keberadaan telepon seluler, surat elektronik, internet, dan televisi satelit digital telah memperdalam globalisasi (Lipalile, 2001:296).

Bali merupakan suatu wilayah yang mendapatkan pengaruh globalisasi. Hal itu dapat dilihat dari perubahan budaya dan struktur keruangan permukiman. Pengaruh globalisasi terjadi karena perkembangan kegiatan wisata yang menimbulkan perubahan tatanan sosial pada masyarakat. Secara sosiologis, perubahan tatanan tersebut dirumuskan sebagai pola pergeseran dari budaya agraris menuju budaya industri, yaitu industri pariwisata. Seperti yang telah diungkapkan oleh Koentjaraningrat, pergeseran tatanan budaya agraris ke industri dapat dilihat dalam unsur-unsur kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (1994:5), unsur-unsur kebudayaan yaitu wujud kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai (sistem budaya), wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas yang berpola (sistem sosial), dan wujud kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia (sistem fisik).

Berdasarkan tatanan masyarakat agraris terdapat dua unsur kebudayaan, yaitu kompleksitas aktivitas dan benda hasil karya. Pada umumnya dua unsur kebudayaan tersebut merupakan pengejawantahan dari ide-ide, gagasan, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat diantaranya nilai-nilai religius. Dalam konteks agraris, kepercayaan pada nilai-nilai religius yang bersumber pada agama Hindu sangat mempengaruhi masyarakat Bali. Dengan demikian, implementasi dan sistem kosmologi masyarakat Bali adalah berupa tradisi adat istiadat dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat Bali. Beberapa contohnya seperti, bencana alam seperti banjir, kemarau panjang, gempa bumi, dan sebagainya. Masyarakat Bali menganggap hal tersebut adalah takdir Tuhan yang Maha Esa yang tidak bisa dihindari bagi mereka, Tuhan adalah sumber segala sumber hukum, baik hukum alam maupun hukum moral

yang berlaku, seperti yang telah diungkapkan oleh Veeger (1995: 82-83). Untuk itu, serangkaian upacara keagamaan yang masyarakat Bali lakukan adalah sebagai bentuk permohonan maaf kepada sang pencipta atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Masyarakat Bali mempercayai bahwa bencana alam dan bencana lainnya yang terjadi diakibatkan karena segala kesalahan yang telah diperbuat.

Berdasarkan spiritual, masyarakat Bali mempercayai bahwa alam dan tanah Bali dihuni oleh makhluk lain di luar dirinya. Wujud dari pengakuan ini terlihat dari beberapa kegiatan penyelenggaraan upacara-upacara keagamaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Salah satu contohnya adalah upacara pembangunan rumah atau pembangunan bangunan lainnya. Selain upacara agama, di Bali pun mempunyai aturan-aturan tertentu dalam pemanfaatan tanah. Kesadaran masyarakat Bali yang meyakini bahwa alam semesta adalah kompleksitas unsur-unsur yang satu sama yang lain saling terkait dan membentuk sistem kesemestaan yang mendasari aturan-aturan dalam pemanfaatan tanah. Dengan begitu, masyarakat setempat selalu berusaha menyesuaikan diri dan menjalin hubungan dengan elemen-elemen alam dan kehidupan sekitarnya. Masyarakat Bali menganggap unsur-unsur tersebut sebagai pedoman dan tuntunan yang digunakan dalam segala kegiatan hidupnya. Nilai-nilai dan asas-asas tersebut masuk ke dalam ajaran filsafat *Tri Hita Karana*. Kaler (1983:86) menyatakan bahwa *Tri Hita Karana* sebagai tiga unsur yang menyebabkan manusia mencapai kesejahteraan, baik kesejahteraan lahir maupun batin. Ketiga unsur tersebut, meliputi adanya keseimbangan antara manusia dan Tuhan sebagai sang pencipta, antara manusia dan manusia, dan antara manusia dan lingkungan alamnya. Berdasarkan konteks ruang (*space*), ketiga unsur tersebut dinyatakan sebagai parahyangan, pawongan, dan palemahan.

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum wilayah penelitian, yakni Desa Adat Kuta, Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali. Persoalan yang ditulis menyangkut sosial, budaya dan ruang yakni Desa adat ke Desa Pakraman, sehingga otomatis berkaitan dengan Perda Desa Adat Nomer 06 Tahun 1986 yang dicabut dan diganti dengan Perda Desa Pakraman Nomor 3 Tahun 2001 dan Perda No 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Desa adat sebagai lembaga tradisional otonom, komunitas budaya tradisional, kesatuan masyarakat hukum adat, dan identitas kolektif masyarakat Bali, mengalami banyak perubahan fisik dan transformasi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat di dalamnya. Realitas ini diterima dan disadari oleh komuniti desa adat, dalam hal ini Desa Adat Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang terkalahkan dalam kontrol dan proteksi tata ruang di wilayah ‘otonominya’. Demikian keberadaan Desa Adat Kuta dalam ruang kulturalnya, termasuk tanah pekarangan tempat tinggal mereka masing-masing, yang sebagian besar tertutup secara fisik oleh deretan bangunan komersial berupa toko-toko cinderamata, barang-barang kerajinan dan seni, produk jasa dan berbagai produk dengan cap dagang yang mendunia.

2.1 Kondisi Umum Wilayah Kuta

Perkembangan desa Kuta sebagai wilayah wisata tidak dapat dipisahkan dari perkembangan daerah tersebut sebagai tempat pemukiman penduduk secara umum. Desa Kuta, sebagai halnya desa-desa lainnya di Bali yang terdiri atas desa adat dan kesatuan administratif (Desa Dinas) yang juga memiliki pola pengembangan yang sama, hanya saja dalam perkembangan selanjutnya sebagai daerah wisata, desa Kuta berkembang sangat pesat dan cepat. Kelurahan Kuta adalah merupakan salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Kecamatan Kuta yang dengan luas wilayah 152.21 Km² pada tahun 1997 memiliki jumlah penduduk mencapai 103.038 jiwa, dengan penyebaran penduduk merata dengan rata-rata 500 jiwa/Km² (Monografi Kecamatan Kuta, 1997). Berdasarkan hal ini maka pada bulan Juli 1999 Kecamatan Kuta akhirnya dimekarkan menjadi tiga kecamatan yakni masing-masing Kecamatan Kuta utara,

Kecamatan Kuta Tengah dan Kecamatan Kuta Selatan. Dalam pemekaran itu, kecamatan Kuta Utara membawahi 6 desa/kelurahan, yaitu : (1) canggu, (2) Kerobokan, (3) Kerobokan Utara, (4) Kerobokan Selatan, (5) Canggu, (6) Dalung. Kecamatan Kuta Tengah, meliputi 6 Desa/Kelurahan, yaitu : (1) Seminyak, (2) Kedonganan, (3) Legian, (4) Tuban, (5) Kuta dan (6) Jimbaran. Kecamatan Kuta Selatan terdiri atas 4 Desa/Kelurahan, yaitu : (1) Pecatu, (2) Benoa, (3) Tanjung Benoa dan (4) Ungasan. Pemekaran ini diresmikan oleh Gubernur Bali, Dewa Made Beratha di Wantilan Kantor Lurah Kuta.

Sebelum menjadi kelurahan seperti saat ini, Kelurahan Kuta bernama desa Kuta, yang mewilayahi Desa Adat Kuta, Desa Adat Legian, Desa Adat Seminyak. Masing-masing desa adat tersebut memiliki beberapa Banjar Dinas. Desa Adat Kuta terdiri atas 7 banjar dinas, yaitu : (1) Jaba Kuta, (2) buni Kuta, (3) tegal Kuta, (4) Pande Kuta, (5) Pengabetan Kuta, (6) Temacun Kuta dan (7) Pelasa Kuta. Sedangkan desa adat Legian terdiri atas 3 banjar dinas, yaitu : (1) Legian Kelod, (2) Legian Tengah dan (3) Legian Kaja., Desa Adat Seminyak terdiri atas dua banjar dinas, yaitu : (1) Seminyak dan (2) Basangkasa. Dalam perkembangannya, Desa Kuta dimekarkan menjadi tiga desa/ kelurahan pada tahun 1998 masing-masing terpisah, yakni : (1) Kelurahan Kuta, (2) Kelurahan Legian, dan (3) Kelurahan Seminyak. Atas pemekaran ini, maka luas Kelurahan Kuta dari sebelumnya 1.293 Hektar berkurang menjadi hanya seluas 723 hektar, dengan batas-batas kelurahan sebagai berikut :

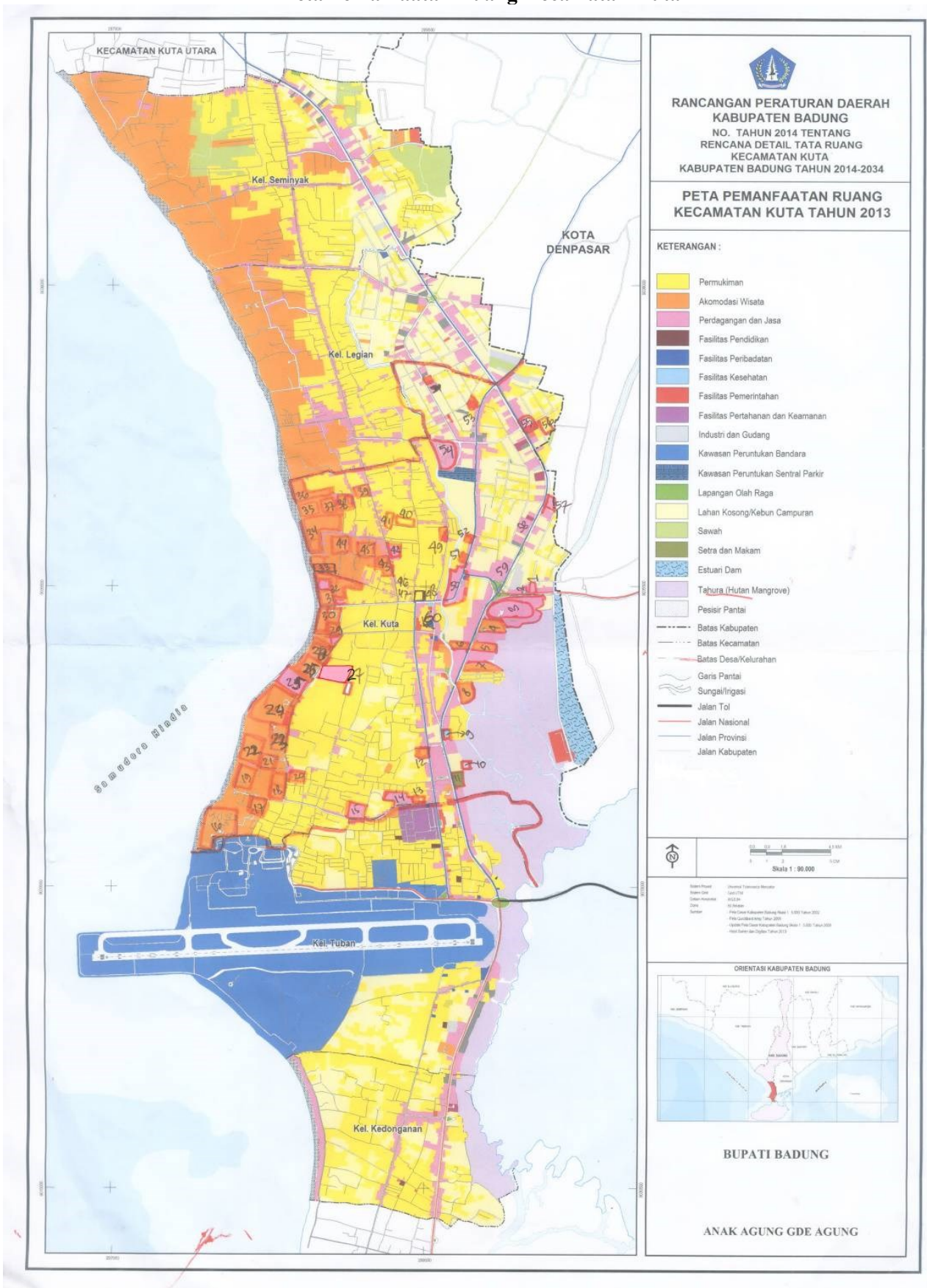
- Sebelah Utara : Kelurahan Legian Kecamatan Kuta
- Sebelah Selatan: Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta
- Sebelah barat : Samudera Indonesia
- Sebelah Timur: Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan.

Secara Topografi Kelurahan Kuta yang membentang di pinggir pantai bagian barat kaki pulau Bali, dengan ombak yang besar dan arus yang sangat kuat dari pengaruh Samudera Indonesia, seluruhnya berbentuk dataran. Kondisi geografis berada kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, dan kesuburan tanahnya tergolong subur dan sedang. Untuk saat ini Kelurahan Kuta tidak memiliki lahan kritis, lahan terlantar, gambut, lahan pasang surut dan juga padang ilalang. Keadaan ini sebagai dampak dari penyempitan lahan dan berubahnya peruntukan lahan

sebagai akibat dari perkembangan kepariwisataan. Berdasarkan Daftar Isian Profil Kelurahan Kuta tahun 2000, maka jumlah penduduk yang tercatat adalah 10.043 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.199 KK. Dari jumlah tersebut terdapat 21 jiwa dari warga negara keturunan (asing), dengan perincian 7 laki-laki dan 14 perempuan. Dalam hubungan ini orang asing yang terdaftar itu bukanlah wisatawan. Secara rinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kelurahan Kuta adalah : sebanyak 5.071 jiwa laki-laki, sebanyak 4.942 jiwa perempuan, dengan kepadatan penduduk mencapai 13, 7 per Km.

Desa Adat Kuta, wilayahnya hampir sama dengan Kelurahan Kuta. Covarubias (1972) merumuskan pengertian desa adat sebagai kesatuan masyarakat di mana rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh wilayah tertentu (karang desa) dengan batas-batas yang jelas dan terikat pula oleh satu sistem tempat persembahyangan yang disebut Pura Kahyangan Tiga yang terdiri atas Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem Desa Adat Kuta merupakan daerah Pariwisata memiliki luas wilayah 723 ha, dengan batas utara Kelurahan Legian, timur Desa Pemogan, selatan Desa Tuban dan barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Daerah ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan pantai. Ketinggian rata-rata di bawah 100 meter dari permukaan air laut, dengan kemiringan rata-rata 0-3%. Desa Pakraman Kuta memiliki 13 banjar adat, serta tergabung ke dalam banjar dinas dan 5 banjar persiapan. Lokasi Desa Adat Kuta sangat strategis sebagai daerah pariwisata. Memiliki pantai yang berpasir putih, dan berhadapan langsung dengan matahari terbenam (sun set), sehingga para wisatawan dapat langsung menikmati keindahan ini. Letaknya tidak jauh dari pusat Kota Denpasar, hanya 12 Km dan 11 km. dari Kota Propinsi serta pusat perkantoran.

Gambar 2.1
Peta Pemanfaatan Ruang Kecamatan Kuta



Posisi Kuta yang memiliki pantai di sisi barat dan sisi timur desa inilah yang menjadikan Kuta sebagai pusat perdagangan sejak zaman kerajaan, sebagai bandar pelabuhan yang hingga kini terkenal. Mad J. Lange sebagai syah Bandar sekaligus pernah sebagai kepala desanya. Kuta memiliki keadaan musim yang tidak berbeda dengan daerah lainnya di Bali, yakni musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan turun pada bulan Oktober sampai Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Akhir-akhir ini bila musim hujan sering banjir. Hal ini mungkin disebabkan karena konstruksi drainase kurang baik, walaupun sebenarnya ada sungai yang menampung air hujan untuk mengalirkannya ke laut. Ada beberapa sungai yang mengalir di daerah Kuta dengan debit air yang kecil, tetapi sungai cukup besar yang mengalir di Kuta adalah Tukad Mati bermuara ke wilayah Timur.

Pulau Bali sebagai tujuan wisata internasional, sudah berkembang secara fisik dengan banyak perubahan tata ruang. Hal ini searah dengan pengaruh pertambahan jumlah dan mobilitas penduduk di masing-masing Kota Kabupaten, Kota, dan Provinsi secara umum. Pusat-pusat perekonomian tentunya membuka dan menarik mobilitas penduduk. Kawasan pariwisata tentunya memberikan pengaruh yang searah dengan Kota sebagai pusat perekonomian Kabupaten. Aktivitas jasa kepariwisataan yang dikembangkan sejak tahun 1920-an, mengkondisikan titik-titik pusat daya tarik wisata, objek turistik, kawasan akomodasi, sentra seni dan kerajinan, dan tempat-tempat jasa pelengkap pariwisata hingga pertokoan dan pasar seni, kerajinan dan cinderamata. Kebijakan pembangunan pariwisata Bali yang dikembangkan adalah pariwisata budaya sesuai dengan Perda Propinsi Tk. I Bali nomor 3 tahun 1991. Kelahiran bentuk pariwisata budaya sendiri sebenarnya melalui suatu proses yang panjang sejak tahun 1970-an. Istilah pariwisata budaya mulai mendapat tanggapan serius sejak dilaksanakannya seminar pariwisata budaya daerah Bali, tanggal 15-17 Oktober 1971. Bila mengacu pada Perda Tingkat I Bali nomor 3 tahun 1991, maka yang dimaksud dengan Pariwisata Budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan Nasional. Wacana di atas berkembang kini dengan wacana keselarasan adat, seni, dan budaya yang saling mendukung dengan pariwisata budaya. Sehingga konsep *learning and experience* dalam pariwisata menjadi penanda bahwa semua pihak atau *stakeholder* harus senantiasa menyikapi dan belajar pada perkembangan

dan dinamika pariwisata sebagai industri global. Kebijakan yang akan dilakukan pun harus bercermin pada fenomena, dinamika dan kebutuhan masyarakat lokal.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Bali nomor, 528 Tahun 1993, Bali memiliki 21 kawasan wisata. Dari 21 kawasan yang ditetapkan ini, maka pada tahun 1999 ditinjau kembali dan kemudian ditetapkan menjadi hanya 15 kawasan wisata. Khusus Kabupaten Badung memiliki 3 kawasan wisata yang meliputi kawasan wisata Nusa Dua, Kuta dan Tuban. Berdasarkan ketetapan gubernur Bali nomor 528 tahun 1993, kawasan wisata Kuta meliputi Kelurahan Kuta (992 Ha), desa Kerobokan (1,598 Ha) dan desa Canggu (1, 173 Ha), dengan luas keseluruhan adalah 3,763 Ha. Kekalahan ruang budaya ini tampak di sepanjang ruas-ruas jalan di kawasan industri pariwisata Kuta yang didominasi atau tertutup oleh bangunan-bangunan komersial dan turistik. Kondisi ini diterima sebagai sebuah kenyataan hidup dalam bentang kawasan wisata dan merupakan sebuah pilihan ekonomis, dengan pertimbangan segala konsekuensi sosial, budaya dan nilai moral, sebagai dampak dan pengaruh langsung kebijakan yang diberlakukan di kawasan ini. Hubungan desa adat dan kawasan industri pariwisata, tampak dilematis, dengan adanya konflik ruang budaya tersebut di atas.

Perkembangan kawasan Kuta sejak tahun 1969, tahun 1980 hingga 1990-an memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat Kuta. Masyarakat yang mau membuka usaha-usaha dagang untuk penyediaan kebutuhan wisatawan, seperti toko-toko cinderamata, pakaian jadi, dan lainlainnya, sudah bisa meningkatkan taraf hidupnya masing-masing. Pengembangan usaha yang lebih besar tentu meraup hasil yang lebih besar. Pada tiga dekade tersebut, pengaruh pariwisata sudah sangat besar mencetak kelas-kelas ekonomi menengah-atas baru di Desa Kuta. Praktik ekonomi sederhana pun meraup hasil yang berlipat ganda sebagai pengaruh ‘memusatnya’ aktivitas pariwisata di Kuta sebagai kawasan wisata. Pemerintah Kabupaten Badung mulai melihat adanya sumber pendapatan yang signifikan dari kawasan pariwisata Kuta. Prinsip ekonomi tradisional atau pandangan akan nafkah hidup bagi orang Kuta, terdorong dan berkembang cepat menjadi prinsip-prinsip komersial dan kapitalistik. Ruang budaya diwarnai dan didominasi oleh ruang ‘gerak’ aktifitas ekonomi kawasan wisata yang *established dan legitimit*. Pada kekinianya Kuta berubah mulai dari wajah depan hingga pelosok-pelosok terdalam ruang dan tempat tinggal penduduknya. Bangunan *kori* atau pintu gerbang rumah tradisional, termasuk

tlajakan bahkan tembok pekarangannya hilang, dan difungsikan sebagai tempat-tempat komersial untuk meraih pendapatan dari uang penyewaannya atau digunakan untuk tempat usaha sendiri. Para pendatang musiman yang belum terdata, diperkirakan mencapai angka 1000-an, misalnya mereka yang tinggal di bedeng-bedeng di lingkungan Banjar Jaba Jero atau arah tenggara Kelurahan Kuta, belum termasuk mereka yang datang ‘mengadu nasib’ di Kuta, dengan tinggal sementara di ruko, gudang perusahaan dan tempat-tempat yang belum terdata. Kehadiran para pekerja dan pebisnis yang melakukan aktifitasnya di kawasan Kuta, dan para wisatawan asing atau domestik yang tinggal sementara, melengkapi intensitas aktifitas kawasan ini sejak pagi, siang hingga malam harinya berlanjut keesokan harinya tanpa henti. Citraan dan istilah *tourist-resort* (baca: kawasan wisata) pun digunakan oleh para pebisnis dan perusahaan jasa wisata, sebagai penguat pencitraan ruang komersial, turistik dan citra keamanan sentralisasi akomodasi dan atraksi pariwisata. Silang tanda dan pencitraan masing-masing individu pelaku usaha, perusahaan akomodasi dan penjual jasa, mengkondisikan Kuta sebagai satu ‘medan tanda’, yang tampak sekilas menarik perhatian dan menghibur setiap orang yang melewati ruas-ruas jalan di kawasan ini. Penampilan tanda komersial dan turistik ini, menyampaikan ‘salam’ dan tawaran kepada setiap pengunjung, terutama ditujukan pada para wisatawan untuk mencoba dan yakin dengan produk-produknya. Representasi tanda turistik tersebut menampakkan karakteristik kawasan wisata ini begitu profan, dengan wajah depannya yang diramaikan oleh kontestasi tanda promosi komersial-turistik dan bazar tanda pariwisata (Darmadi, 2005).

Kebijakan dalam pandangan masyarakat lokal, khususnya *indigenous people* atau warga Desa Adat Kuta, tampak masih ambivalen. Terlebih lagi dalam sebutan masyarakat awam, baik sebagai penduduk pendatang atau warga desa adat, kebijakan tampak masih samar dan ‘jauh tinggi’ dari jangkauan pemikiran dan pengetahuan mereka, kelompok masyarakat awam menerimanya sebagai regulasi mutlak pemerintah yang disebut dengan ‘aturan dari atas’. Perubahan tata ruang yang terus berjalan cepat pada pembangunan fasilitas pariwisata oleh pemerintah, swasta hingga perubahan tataruang pekarangan rumah, diterima sebagai sebuah pilihan atau langkah ekonomis dan kenyataan hidup di kawasan wisata. Berbagai dampak implementasi kebijakan di kawasan ini, diterima sebagai kenyataan yang tidak bisa dibantah, sebagai konsekuensi ‘kebijakan kawasan’ bagi desa adat dan masyarakat

lokal kawasan secara umum. Konfirmasi kewenangan atau otoritas dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang berlokasi di tengah-tengah lingkungan Desa Adat Kuta, masih menyiratkan adanya ambivalensi. Di mana adanya sistem serta mekanisme pengawasan, kontrol dan otoritas pengeluaran perizinan hanya sebatas perizinan untuk usaha rekreasi dan hiburan wisata, penginapan hingga hotel melati. Keberadaan toko atau kios-kios di seluruh kawasan wisata Kuta, ditangani dan menjadi wewenang dinas-dinas dan otoritas lain di pemerintahan Kabupaten Badung dan selebihnya untuk perizinan hotel berbintang tiga ke atas, merupakan otoritas dinas pariwisata provinsi.

Pariwisata budaya sebagai sektor andalan daerah Bali, sebagai *leading sector* di bidang ekonomi, memiliki ‘lintasan orbit’ yang luas (Darmadi, 2005), melewati dan melampaui sektor-sektor ekonomi lainnya hingga bidang-bidang kehidupan lain. Merupakan peluang besar bagi pengusaha kecil dan menengah dalam berusaha, bila bisa menangkap pengaruh tidak langsung *multiplying-effect* atau efek pelipatgandaan pendapatan bagi sumberdaya dan potensi yang digunakan sebagai komoditas dan pendukung usaha atau industri jasa yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata, yang sangat berpengaruh besar pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kawasan. Erawan (1996: 10-16) menemukan efek pelipatganda ini berpengaruh besar pada industri kecil dan menengah, terlebih lagi bagi para pengrajin dan pelaku-pelaku usaha jasa dan akomodasi lokal dalam siklus perputaran uang di kawasan wisata. Kini, melewati tiga dekade hubungan dan interaksi masyarakat lokal dengan aktifitas pariwisata, segala keuntungan dan kerugiannya sudah dipertimbangkan oleh masyarakat Bali, khususnya masyarakat Kuta. Interaksi pariwisata dengan tradisi, seni dan budaya, sebagai sektor multidimensional, dirasakan pengaruhnya yang sangat besar bagi masyarakat. Sehingga pariwisata ditolerir atau ‘diikan’ sebagai legitimasi pemanfaatan sumberdaya hingga komodifikasi eksotika alam, budaya dan kesenian, yang tidak disadari menjadi domain baru budaya turistik dalam kehidupannya.

Kebijakan pariwisata pun mesti dibuat sebagai realisasi agenda atau program perencanaan dan kontrol pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah kabupaten. Secara sosiologis, dalam konteks politik dan birokrasi, posisi masyarakat lokal hingga masyarakat ‘perantau’ atau *the others*, tampak *intriguing* atau semakin

menarik perhatian untuk ditelusuri keberadaannya. Peningkatan infrastruktur pariwisata bersamaan dengan realisasi pembangunan fisik daerah dan nasional, mengkondisikan masyarakat Kuta ‘ada’ dan ‘mengada’ dalam pariwisata di atas *space and place* atau ruang dan tempat komunitas pendukung budaya setempat atau *indigenous people*, yaitu ruang desa adat. Pada masa awalnya, jalan-jalan *penepi siring* Kuta atau perkampungan pesisir Kuta, merupakan jalan atau akses tempat-tempat suci dan fasilitas kegiatan adat, yang harus menerima fungsi baru sebagai akses atau infrastruktur kawasan industri pariwisata. Perbaikan wajah dan fisik Desa Adat Kuta menjadi penanda perubahan cepat yang kurang dari hitungan dekade atau sewindu, kemudian perubahan mendasar pun mempengaruhi tataruang perumahan, banjar atau lingkungan dan desa adat. Realitas perubahan dan konflik ruang yang diterima sebagai keniscayaan era global, mendorong dan mempengaruhi perubahan cara berpikir, sikap dan pandangan atas relevansi dan berlakunya nilai-nilai lokal atau *indigenous values*. Seperti halnya pengakuan Bendesa Adat Kuta dan warga Desa Adat Kuta, harus menerima situasi dan kondisi desa adatnya sebagai ‘daerah terbuka’(sebutan ruang terbuka). Satu ungkapan yang mengandung kesadaran, kekhawatiran dan resistensi atas konsekwensi keberadaan lingkungannya sebagai kawasan pariwisata. Sebuah ruang terbuka dengan tersedianya banyak akses jalan masuk ke Kuta, bahkan bandar udara yang begitu dekat, memungkinkan siapa pun bisa masuk ke desa adat kami pada jam dan tempat yang mereka kehendaki. Akomodasi dan tempat hiburan selalu menyapa dan menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Kasus-kasus atau peristiwa konflik antara masyarakat lokal dan pendatang, atau dengan pengembang pariwisata, seperti yang terjadi di daerah-daerah lainnya di Bali, hampir sebagian mengibarkan ‘bendera desa adat’ untuk mengamankan aset-aset dan wilayah desa adatnya. Hal ini dicermati juga sebagai luapan reaksi atas tekanan hegemonik kekuasaan rezim penguasa negara dalam waktu yang cukup lama, kemudian terlampiaskan pada satu masalah dominasi ruang yang dipelajari sejak lama. Konflik senada pernah terjadi di kawasan Kuta, dengan tekanan kekuatan politik desa adat. (Pitana et al, 2000). Kesiagaan, koordinasi dan komunikasi antardesa adat, ternyata kemudian mendapatkan insiden ‘ledakan bom teroris’ pada tanggal 12 Oktober 2002 di depan sebuah café-bar di perbatasan Desa Adat Kuta dengan desa adat Legian. Musibah yang tidak pernah terbayangkan oleh masyarakat Kuta bahkan oleh masyarakat Bali, mematri suasana traumatik yang lama

dan akhirnya harus diterima sebagai sebuah kenyataan. Aksi teroris bom yang lebih kecil terjadi lagi di sudut Kuta lainnya, tetapi menambah parah trauma pelaku bisnis pariwisata dan masyarakat lokal di lingkungan Desa Adat Kuta, ditambah satu terror bom di lingkungan desa adat Jimbaran, sekitar 5km arah selatan Kawasan Wisata Kuta, kembali merobek citra keamanan pariwisata Bali. Kenyataan pahit ini harus diterima sebagai bentuk ancaman yang bisa terjadi kapan pun di lingkungan desa adatnya, sebagai konsekuensi kehidupan masyarakat kawasan wisata ke masa depan. Ancaman ini juga menghantui desa-desa adat yang ada di sekitar bentang kawasan Kuta Keberadaan monumen tragedi terror bom Kuta tahun 2000, yang lebih dikenal dengan *ground zero*, menjadi penanda terbukanya sebuah kawasan yang harus ditangani bersama semua komponen masyarakat dan pemerintah. Ingatan traumatik *zero ground* sebagai penanda '*zero tourism*' yaitu kekhawatiran akan berakhirnya sebuah kawasan turistik dengan citraannya.

Saat ini semuanya diterima sebagai sebuah kenyataan oleh seluruh komponen sektor pariwisata Bali, dengan dampak sosial-ekonomi yang berkepanjangan terhadap perekonomian rakyat dan pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Badung dan kabupaten lainnya yang mengusahakan obyek dan daya tarik wisata sesuai potensi daerahnya masing-masing. Dua kali ledakan dahsyat bom di kawasan wisata Kuta dan Pantai Jimbaran tersebut, terasa seperti 'luka yang berangsur sembuh tertoreh kembali'. Dalam situasi traumatik ini, ada tiga reaksi utama (Couteau, 2003) yang menandai peristiwa tersebut, yaitu gelombang solidaritas, kecendrungan ke arah ritual dan ketegangan stabilitas yang mendorong politisasi lembaga adat untuk memperketat kontrol terhadap arus masuk penduduk pendatang, dan termasuk penertiban identitas penduduk pendatang asal daerah luar Bali. Nilai atau kearifan lokal atas ruang dan waktu atau *space and time*, berupa konsep dan nilai *desa, kala, patra* sebagai *lokal values* yang berlaku pada ruang dan waktu 'ada' dan 'mengada' manusia Kuta dengan tradisi atau adat-istiadatnya, sekarang harus menerima, menyetujui dan melepaskan ruang-ruang yang ada untuk tempat komersial dan turistik. Di balik itu, dalam representasi religio-magis mereka, atau ruang *niskala* yang *invisible*, Desa Adat Kuta dikelilingi oleh situs-situs magis tempat kekuatan-kekuatan magis yang dipercaya sebagai pancaran manifestasi Tuhan Yang Maha Kuasa. Religiusitas dan magisme tradisional ini, masih berpengaruh kuat dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Adat Kuta, ditengah perubahan sosial yang

begitu cepat, internasionalisasi kawasan wisata dan globalisasi. Melalui proses internasionalisasi ini, posisi desa adat dalam kawasan wisata, sebagai masyarakat penerima wisatawan, yaitu sebagai *'tourism society dan host community'* (Pitana, 2000), masih menjadi pokok permasalahan, ketika muncul resistensi masyarakat lokal sebagai indikator ambivalensi dan rasa ketidakadilan yang menuntut kompensasi atas pemanfaatan segala potensi keindahan alam dan tradisi secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, wacana pariwisata Bali dalam promosi pariwisata budaya menutup representasi budaya masyarakat kawasan Kuta, yaitu Kuta sebagai kawasan turistik yang global bukan sebagai kawasan wisata yang kultural.

Berhentinya pentas-pentas kesenian tradisional di Kuta pada tahun 1980-an yang disusul dengan bertambahnya tempat hiburan diskotik dan karaoke, menarik perhatian dalam investigasi ini, untuk dicari sebab-musababnya. Representasi tataruang turistik dan komersial Kawasan Wisata Kuta, mengesankan 'Kuta bukan Kuta yang dulu lagi' tapi Kuta yang 'kalah menyerah' terhegemoni dalam belengu kawasan turistik, global dan profan. Retrospeksi kolektif pasca konflik kawasan, (Pitana, et al, 2000: 108- 110) bahkan kondisi pascadua kali teror ledakan bom, senantiasa mendorong sikap resisten dan mawas diri. Pembentukan identitas kultural dengan berbagai akar nilai dan tradisi hingga aspek geneologis menguat menjadi politik identitas. Hal ini memberi pengaruh progresif pada tindakan pengawasan dan penertiban penduduk pendatang dan kelompok penghuni 'bedeng' yang sering menghindari dari petugas kelurahan dan desa adat untuk didaftar status domisilinya. Penguatan elemen-elemen desa adat, upaya pelestarian bangunan dan perangkat ritual hingga atribut-atribut adat dan religius secara kultural, untuk menjawab representasi profan-turistik kawasan Kuta selama ini. Ungkapan 'daerah terbuka' terhadap situasi dan kondisi desa adat mereka, sangat bermakna mendasar dalam konteks ruang dan waktu mereka sebagai masyarakat terbuka. Realitas sosial ini merupakan kehidupan kawasan wisata yang turistik, penuh dengan berbagai aktifitas pelayanan akomodasi, hiburan dan penjualan produk-produk pariwisata sepanjang hari di tempat-tempat yang ditata untuk tampil turistik sedemikian rupa sejak pagi hingga matahari terbit keesokan harinya. Dominasi tempat komersial dalam ruang desa adat ini, menandakan ambivalensi dalam realitas sosial di mana terjadi hegemoni kawasan yang tidak disadari oleh warga Desa Adat Kuta. Pariwisata

disadari membawa ancaman keamanan terhadap desa adat, dengan terjadinya aksi terorisme bom pertama dan kedua yang masih dinilai sebagai sebuah ironi besar, dan harus ditanggung dan dirasakan oleh warga desa adat yang turun-temurun hidup di desa ini.

2.2 Sejarah dan Perkembangan Kepariwisata Kuta

Sejarah Kuta menjadi sebuah *petit histoir* atau sejarah kecil yang menarik bila dilanjutkan dengan lahirnya turisme di pantai putih yang indah pada masa 1960-an. Kisah Miss Menk atau Ayu Poppies yang romantik, menjadi penanda-penanda turisme dan semangat glocalisme dalam kekiniannya. Kuta begitu akrab dan terkenal. Hampir di seluruh masyarakat dunia mengenal nama Kuta. Demikian desa Kuta yang sudah sejak ratusan tahun lalu, dihuni oleh beragam etnik. Mereka datang dari Jawa, bersama bala tentara Kerajaan Majapahit dalam politik ekspedisi Gajah Mada dalam kurun waktu 1343-1846. Kedatangan penduduk Jawa lainnya dalam masa zaman Samparangan sekitar tahun 1350-an sebagai pengikut Dalem Ketut Srikresna Kepakisan, kemudian muncul pula orang-orang Cina pedagang. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya kelenteng yang diperkirakan berumur lebih dari dua ratus tahun (lihat Monografi Kec. Kuta, 1991/92 dan 1997). Secara historis, ada empat tahapan waktu yang dapat dikemukakan dalam pengembangan wilayah tersebut sebagai daerah wisata yang masing-masing memperlihatkan kondisi yang khas dan memberikan gambaran bahwa sebagai daerah waisata, desa Kuta mempunyai potensi-potensi yang khusus pula sesuai tahapan perkembangannya.

2.2.1 Kuta Sebelum Kemerdekaan

Kuta menjadi penanda historis Bali selatan sejak zaman kerajaan. Pertama, Kuta merupakan sebuah desa magis yang dijadikan pelabuhan kuno yang disebut Kuta dalam kaitan nama tempat di antara Tuban dan Canggu sebagai representasi bekas ekspansi Kerajaan Majapahit sejak abad ke 13, kemudian dihuni oleh pendatang dari Jawa, Bugis dan orang-orang buangan pada masa pemerintahan Kerajaan Bali yang berpusat di Gelgel pada sekitar abad ke 15 sampai abad ke 16. Kedua, Kuta sebagai *wanua* atau desa adat baru di bawah Kerajaan Mengwi pada abad ke 17, merupakan hutan pesisir yang sangat indah yang disebut Kuta Mimba. Pemetaan tradisional pada masa ini, masih dalam bentang wilayah kerajaan tradisional Mengwi, sebagai desa pesisir. Ketiga, Kuta identik dengan kota (baca:

kota dalam lafal Bali), di bawah kekuasaan Kerajaan Badung, yaitu kota kecil pelabuhan yang memiliki dua sisi dermaga alami yaitu sisi barat di Pantai Kuta dan sisi timur di Sungai Mati. Cerita turun-temurun tentang Tuan Lange, terkait dengan situasi pada masa ini, dimana Mads J. Lange mendapat kepercayaan dari Kerajaan Badung untuk memegang posisi syah bandar sekaligus Perbekel Kuta dengan julukan 'Tuan Made Lange Tua'. Wajah multikultural Kuta, terbentuk sejak sebelum abad ke 17, yang tercatat dalam kedatangan warga Tionghua di Kuta sekarang. Keempat, Kuta merupakan desa pesisir penghubung perbukitan selatan kaki Pulau Bali dan Badung (baca: Denpasar sekarang), yang nihil aktifitas ekonomi berskala makro. Kondisi ini merupakan keadaan yang tidak banyak diketahui orang, baik dari mulut ke mulut maupun bahan-bahan tertulis lainnya. Sebagaimana dengan desa-desa lainnya, penduduk desa Kuta terdiri atas penduduk Bali yang hidup dan mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Pekerjaan ini cukup lama digeluti walaupun sarana transportasi belum lancar.

Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pada sekitar tahun 1930 sampai 1940-an, Kuta mendapatkan perhatian dari seorang wanita asing berkulit putih berkebangsaan Amerika datang dan kemudian tinggal di Bali "Nyonya Manx (Bahasa Bali diucapkan, Meng)" adalah sebutan yang diberikan oleh penduduk Kuta kepada wanita asing tersebut. Hal ini mungkin sebuah kelakar saja dari rambut wanita asing yang pirang itu seperti warna kucing (dalam bahasa Bali "meng"). Nama Nyonya Manx, sesungguhnya adalah merupakan nama fam atau keturunannya dari ayahnya bangsa manx, di Skotlandia. Orang-orang manx sangat percaya tahyul, sihir dan orang kerdil dan masalah-masalah gaib serta sebagai rakyat yang ulet, mempunyai daya tahan yang aneh dalam menghadapi cobaan hidup. Dan ketika tahun 1932 menurut nyonya Manx, dalam buku *revolt in paradisenya* yang dialih bahasa oleh Abdul Bar Salim, (1964) mula pertama adalah berawal dari ia menonton film *The Last Paradise* atau "Bali Sorga Terakhir" di sebuah bioskop di Hollywood menggugah hatinya untuk datang ke Bali sebagai tempat yang selama ini diinginkannya (K'tut Tantri, 1964, 33-36). Bali dengan pantai Kuta, religiusnya dan ketenangannya dan keadaan hidup yang damai dalam suasana yang penuh kasih sayang dalam film tersebut akhirnya menggugah hatinya untuk segera mengunjunginya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kemasyuran Bali sebagai daerah wisata ke manca negara sudah mulai dikenal jauh sebelum tahun 1932. ketika

sudah di Bali Nyonya Menx selanjutnya diangkat anak oleh raja Bangli, dan diberi nama, K'tut Tantri. Semenjak diangkat anak, maka ia semakin diterima di tengah-tengah masyarakat Bali dan banyak dapat kemudahan ketika ia mendirikan sebuah hotel di Kuta yang bernama hotel Suara samudera. Hotel yang begitu terkenal dengan gaya arsitektur campuran antara Bali tradisional, puri dan Eropa, dikerjakan oleh Wayan dan arsitek Bagus, serta bantuan yang banyak dari putra raja yang bernama Anak Agung Ngurah (K'tut tantri, 1964, 139-161). Mungkin inilah salah satu hotel yang pertama berdiri di Kuta dan menjadi terkenal sebagai tempat yang unik dan memperoleh sukses.

Semangat persahabatan sangat terasa, sehingga tamu konon sampai keluar masuk dapur untuk ikut belajar bagaimana membuat masakan Bali/Indonesia. Kata orang bahwa hotel suara samudera adalah tempat di mana tamu menunggu pelayan, bukan pelayan menunggu tamu. Hal ini tidak berlangsung lama, akrena polisi kolonial Belanda berusaha menutup dan menangkap para pelayan hotel, dengan alasan bahwa hotel ini tempat cabul dan prostitusi. Kolonial Belanda melaui Gubernur Jendralnya memerintahkan membersihkan semua homo-seksual, sebagai dalih agar dapat melakukan penangkapan pada orang-orang yang tidak berdosa dan bersalah yang mungkin dicurigai. Kekhawatiran para *controllir* Belanda ini tampak membatasi pergaulan antara orang lokal dengan bangsa berkulit putih, dan senantiasa membodohi masyarakat lokal. Bila hotel Suara Samudera terus berkembang dan interaksi antara masyarakat lokal makin intensif, maka dikhawatirkan akan terjadi banyak perlawanan yang menyulitkan kedudukan pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia dan Bali khususnya. Apapun persoalan itu yang jelas berdasarkan hal ini, Hotel Suara Samudera dan K'tut Tantri di Pantai Kuta sebagai awal dari sejarah pantai Kuta sebagai tempat wisata yang terkenal ke manca negara. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang yang mengalahkan Belanda, hotel Suara Samudera ini dicurigai sebagai tempat berkumpulnya para opsir-opsir Belanda, dan terutama dicurigai sebagai tempat bertemunya para pejuang Pergerakan Kemerdekaan Republik dalam melawan upaya merencanakan dan melawan Jepang. Oleh karenanya tentara Jepang akhirnya menghancurkan hotel Suara Samudera tersebut. Lenyaplah semua kebanggaan Nyonya Menx alias K'tut tantri bersama hotelnya dan keikutannya dalam pergerakan kemerdekaan maka ia pun akhirnya sempat dipenjarakan. Tidak berarti ketenaran dan keindahan pantai Kuta lantas menjadi

tenggelam, ternyata jumlah kunjungan masyarakat sekitar dan Denpasar serta wisatawan mancanegara semakin banyak yang datang menikmati keindahan pantai dan alamnya sebagai daerah wisata yang terus berkembang.

2.2.2 Tumbuhnya Turisme Kuta Setelah Masa Kemerdekaan

Memasuki masa kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1970-an. Turisme tumbuh dari embrio hasil interaksi yang semakin lama antara warga desa dan pelancong asing. Dengan referensi artikel dan informasi di negaranya, para wisatawan menemukan sendiri pantai Kuta dengan datang sebagai pelancong (baca: sebutan turis pada masa ini) yang datang ke Bali dan khususnya menyenangkan pantai Kuta. Keadaan ini dapat digambarkan melalui perkembangan kepariwisataan Kuta yang cepat dan tanggapnya para wisatawan usia muda (*young traveller*) terutama yang berasal dari Australia yang datang ke Kuta semakin ramai pada masa-masa akhir dasa warsa 60- an. Pada awal tahun 70-an, pantai Kuta diramaikan oleh pengunjung yang pada masa itu, disebut *hippies* yang pergi tanpa suatu program perjalanan tertentu, lebih senang mengurus diri sendiri daripada terikat dan ditangani oleh agen wisata atau biro perjalanan umum. Mereka kebanyakan pergi dengan berpasang-pasangan dan sangat jarang berkelompok/bergroup. Demikian juga pada mulanya mereka ini lebih senang tinggal di rumah-rumah penduduk, makan di warung-warung penduduk dengan apa adanya, berkendara sepeda motor dengan berpakaian sederhana seperti layaknya petani dan nelayan dipantai Kuta. Para wisatawan jenis ini tampak lebih berkualitas dan belum menunjukkan adanya *ugly tourist*. Mereka masih sopan, senang melihat budaya dan bahkan karena tinggal di rumah penduduk sehingga tidak sedikit yang ikut mau berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat dalam kehidupannya berumah tangga sehari-hari. Kedatangan yang terus meningkat ini, maka oleh masyarakat Kuta berupaya memanfaatkan kehadiran para wisatawan itu dengan membuka usaha penyewaan rumah penginapan, penyewaan sepeda motor, serta membuka warung-warung makan serta cenderamata (souvenir), dan jasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan para wisatawan. Oleh karenanya pada masa tahun 1970-an Kuta marak dengan model penginapan dan tempat makan seperti : *home stay*, pondok wisata, pension, *inn*, bar, dan beberapa agen perjalanan wisata. Sejak masa inilah, masyarakat Kuta semakin banyak yang terlihat dalam kegiatan kepariwisataan, dengan berbagai pertarungan antara berpandangan positif

dan negatif terhadap hubungan yang dekat dengan wisatawan (bule) dengan adanya upaya-upaya komersialisasi adat dan budaya yang ada semata-mata untuk wisatawan. Perkembangan selanjutnya menjadi semakin merubah bentuk Kuta, di mana tidak hanya masyarakat Kuta saja yang terlihat dalam kegiatan pariwisata, melainkan juga masyarakat Bali lainnya, dan bahkan orang dari luar Bali yang banyak datang mencari pekerjaan di Kuta. Sedangkan dari kemajuan yang ada maka terlihat juga bahwa *home stay* pun semakin berkembang menjadi beberapa hotel, warung berubah menjadi restaurant, dan demikian mulai dibangun beberapa *art shop*, serta dipinggir pantai mulai ada penyewaan papan selancar dengan banyaknya muncul berbagai pedagang acung.

Rasa tanggap masyarakat Kuta akan keperluan dan kebutuhan para wisata atau wisatawan, sehingga benar-benar sebagai salah satu peluang untuk berusaha membuka berbagai jasa pelayanan yang sebaik-baiknya. Hal ini merupakan ciri khas dari kondisi tahap kedua dalam sejarah perkembangan kepariwisataan Kuta. Jadi ciri khas dari masa pertumbuhan awal ini menjadi semacam pusat tempat pengembangan kepariwisataan daerah pesisir pantai dan berbagai macam bentuk adanya home stay yang tidak dimiliki oleh daerah wisata lainnya. Adanya home stay sebagai tonggak awal dari sistem perkembangan kepariwisataan Kuta, yang selanjutnya terkait erat dengan sub-sub sistem lainnya dalam pemenuhan kebutuhan kepada wisatawan, selain potensi pantai yang cocok untuk olah raga air seperti selancar (*surfing*) didukung oleh keindahan alam dan sinar matahari seharian sangat menggoda, menyengat dan menantang dalam mandi matahari atau sunbathing yang sudah tidak asing bagi masyarakat lokal. Tourist sangat menikmati aktifitas berjemur seharian di sepanjang pantai.

2.2.3 Masa Pengembangan Kawasan Turistik Kuta

Masa pengembangan fisik kawasan secara fisik dan kebijakan pada masa ini, membuka perkembangan daerah (baca: sebutan kawasan pada masa ini) wisata Kuta yang komersial dalam dasa warsa 80-an sampai 90-an. Selama kurang lebih sepuluh tahun dari perkembangan home stay sebagai pusat sistem dan sub sistem berkembang dalam memenuhi kebutuhan wisatawan, semakin memperlihatkan suatu keadaan bahwa pariwisata dapat dipandang sebagai suatu agent dari perubahan Kuta. Perkembangan sebagai suatu perubahan yang positif dari kondisi kedua, ternyata

melebar dan meluas dari Desa Adat Kuta, mempengaruhi desa adat tetangga seperti: desa adat Legian, Seminyak, Tuban, Jimbaran dan Kerobokan. Sepanjang jalur pantai mulai berdiri hotel-hotel besar hingga bintang lima, kemudian art shop, restaurant, bar, pub, diskotek, money changer, yang berjejer dan berhimpit sampai pada gang-gang kecil di lorong-lorong Kelurahan Kuta. Di beberapa tempat bahkan berdiri pusat-pusat pelayanan informasi kepariwisataan, serta menjamurnya travel agent, biro-biro perjalanan wisata, dan transport semakin berkompetisi, bersaing menawarkan berbagai keunggulan produk yang dimilikinya.

Walaupun dari karakteristik wisatawan yang menyukai Kuta umumnya adalah berusia muda, dari Australia, Jepang, dan juga dari Benua Eropa, tetapi dalam perjalanan wisatanya juga cukup banyak yang bepergian secara bersama-sama untuk menekan biaya perjalanan tersebut. Raminya kunjungan wisatawan manca negara yang sengaja berjemur dan melakukan olah raga air, *surfing* di pantai Kuta, juga menjadi daya tarik utama kepada wisatawan domestik untuk datang ke pantai Kuta guna melihat dari dekat aktivitas wisatawan mancanegara, yang terkenal dengan sebutan *bule-bule* itu ketika saat berjemur di sepanjang pantai Kuta. Mereka ingin lebih mengetahui karakteristik wisatawan, kemudian senang bisa berfoto bersama disamping ikut bersama-sama menikmati keindahan alam dan pantai Kuta.

2.2.4 Perkembangan Kuta ke Arah Kapitalistik

Perubahan fisik dan ruang Kuta berjalan cepat sejak tahun 1990-an hingga tahun 2000 dalam perspektif pembangunan, dalam perkembangan kepariwisataan Kuta, tercatat ada dua pengaruh besar kebijakan pemerintah terhadap kehidupan kawasan, yakni : (1) bahwa akibat adanya kemudahan dan terbukanya intervensi para investor asing yang boleh mendirikan hotel-hotel bintang lima di Kuta. Kebijakan ini bagai pedang bermata dua yang satu sisi menguntungkan pemerintah pusat untuk pajak dan pendapatan serta bagi masyarakat lokal Bali (bukan hanya Kuta) yang dapat menikmati terbukanya peluang kerja. Bagi masyarakat Kuta sendiri cukup berdampak negatif, yang mengakibatkan penginapan lokal atau *home stay* yang ada sebelumnya semakin sulit bersaing dalam mendapatkan tamu, termasuk semakin meluasnya dominasi ruang turistik komersial dan kapitalistik terhadap *karang desa* atau ruang budaya lokal.

Demikian juga terjadi cukup banyak pelanggaran terhadap kebijakan lain seperti masalah lingkungan, sepadan pantai dan terutama dari segi peruntukan wilayah. Terhadap persoalan ini maka upaya mengatasi penekanan terhadap pemilik *home stay*, maka tahun 1999 ada upaya penggabungan (merger) ini dimungkinkan dengan adanya bantuan kredit bank, di mana para pemilik mulai meningkatkan kualitas fasilitas kamar setara dengan pemenuhan terhadap kebutuhan wisatawan sebagai mana hotel-hotel besar yang bertaraf internasional, dengan bergerak bersama dalam manajemen dan pemasarannya. Pada kondisi ini semua *home stay* sesungguhnya masih tetap ingin dipertahankan walaupun dalam jumlah yang kecil adanya tetapi akan memberikan dampak dan citra yang tinggi dalam pola pariwisata budaya. (2) Adanya kebijakan pemerintah yang membuka lebar-lebar pintu bandara Ngurah Rai sebagai bandara internasional dan diberlakukannya kebijakan pemerintah "bebas visa" sejak 17 Agustus 1992, maka terjadi peningkatan jumlah penerbangan asing dari berbagai negara yang langsung ke Bali tanpa harus melalui Jakarta. Kebijakan penerbangan ini terwujud juga atas desakan para investor yang menanamkan modalnya di dalam bentuk hotel berbintang lima di Kawasan Pariwisata Kuta dan sekitarnya.

Kenyataan ini dapat dibuktikan berdasarkan distribusi prosentase PDRB Bali atas harga yang berlaku dari tahun 1994-1999 pada sektor pariwisata (perdagangan, hotel dan restaurant) memberikan masukan yang paling banyak dan jauh meninggalkan sektor pertanian yang memberikan sumbangan maksimal 23, 31% tahun 1998. sedangkan sumbangan sektor pariwisata terus meningkat setiap tahunnya yakni 30, 11% tahun 1994; 30, 51% tahun 1995; 30, 78% tahun 1996; 30, 50% tahun 1997 (awal krisis); 30, 49% tahun 1998 (puncak krisis) dan menjadi 31, 26% tahun 1999 (PDRB) Prop. Bali 1994-1999: 20). Sejak saat itu maka perkembangan kepariwisataan Kuta melaju dengan pesatnya. Semakin ramainya dan padatnya pengunjung ke pantai Kuta, pada kondisi keempat ini mulai sekitar tahun 1997 semakin terjadi kerawanan terhadap kebersihan, keamanan dan kenyamanan, ketertiban penggunaan pantai, kesemrawutan para pedagang acung dan sebagainya. Oleh karena itu keberadaan pantai Kuta perlu dikelola dengan baik dan terarah agar senantiasa tampak asri, bersih, aman, nyaman dan lestari dengan fungsinya yang masih digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah agama Hindu, seperti : melasti, nganyut, mekiis dan sebagainya. Atas dasar pertimbangan ini maka pemerintah

daerah Kabupaten Badung melakukan kerjasama pengelolaan pantai Kuta dengan Puskopad Kodam IX Udayana. Kerjasama ini secara tegas mengatur hak dan kewajiban sebagai pengelola dan dengan mengindahkan kaidah-kaidah sosial budaya masyarakat lokal khususnya Desa Adat Kuta. Demikian dalam pelaksanaan Puskopad Kodam IX Udayana sebagai pengelola pantai Kuta, ternyata mampu menata dan mengikat serta melindungi para pedagang acung dan kaki lima yang berjualan di wilayah Kelurahan Kuta.

2.3 Hubungan Sosial-Geografi Kelurahan dan Desa Adat Kuta

Hubungan Kelurahan dan Desa Adat Kuta, secara historis merupakan pengaruh kerajaan dan penjajahan kolonial Belanda, yang mewarisi hubungan desa adat dan desa dinas hingga berstatus kelurahan sekarang. Sebelum tahun 1998, ketika Kelurahan Kuta mewilayahi tiga desa adat, yaitu; Desa Adat Kuta, Desa Adat Legian, dan Desa Adat Seminyak, nampak kedudukan desa dinas atau kelurahan hanya sebagai lembaga formal yang mengurus domisili dan administrasi penduduk. Setelah pemekaran Kuta menjadi tiga kelurahan sesuai wilayah desa adat, posisinya menjadi lebih dinamis dan aspiratif walaupun Lurah ditempatkan secara dinas oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Kelurahan Kuta, Kelurahan Legian dan Kelurahan Seminyak identik dengan nama dan wilayah desa adat, dengan masyarakatnya.

Pitana (1994, 2000) menyebutkan bahwa ciri-ciri sebuah desa adat, mempunyai wilayah dengan batas-batas wilayah yang jelas. Batas ini dapat berupa sungai, hutan, jurang, pantai ataupun batas-batas buatan seperti tembok penyengker dan lain-lain. Mempunyai anggota (krama) yang jelas dengan persyaratan tertentu, sebagian besar anggota berdomisili di desa adat yang bersangkutan dan anggota desa adat memiliki ikatan yang sangat kuat terhadap Desa adatnya. Keberadaan Pura Khayangan Tiga atau kahyangan desa sangat mutlak. Kahyangan tiga biasanya terdiri atas Pura Puseh, Pura Desa, Bale agung dan Pura Dalem. Tapi di desa adat tertentu menyesuaikan karena untuk di daerah pantai, ada yang menggarap Pura Segara sebagai Pura Desa.

Desa adat mempunyai otonomi baik keluar maupun ke dalam. Otonomi ke dalam berarti kebebasan atau kekuasaan dalam mengatur rumah tangganya sendiri, dan otonomi keluar diartikan sebagai kebebasan untuk mengadakan kontak langsung dengan institusi di luar desa adatnya sendiri. Sebagai satu kesatuan wilayah hukum

adat, desa adat memiliki satu pemerintahan adat, dengan kepengurusan (prajuru adat) sendiri berlandaskan pada peraturan-peraturan sendiri (awig-awig) baik tertulis maupun tidak tertulis. Dikatakan pula bahwa desa adat merupakan salah satu monumen yang menjadi ciri kehidupan sosial budaya religius dalam masyarakat Bali. Monumen tradisional ini berperan dalam pembangunan masyarakat Bali dalam berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, religius, politik dan keamanan. Secara umum semua orang Bali (Hindu) adalah bagian dari Desa adat, karena hampir semua manusia Bali menjadi salah satu atau lebih anggota Desa adat. Adapun pengempon masing-masing pura di Desa Adat Kuta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.1
Nama Pura, Banjar, Pangempon, dan Anggota Pemaksan Pura

No	Nama Pura	Banjar Pangempon	Jumlah Anggota	Odalan
1	Puseh	Pelasa Br, Anyar	351	Paing Galungan
2	Dalem	Pande Mas Pangabetan	365	Anggar kasih, medangsia
3	Pura Desa/Bale Agung	Pering, Pemamoran Temacun	221	Pemacekan Agung
4	Pura Segara	Teba Sari Segara	300	Buda cemeng kelau
5	Panataran	Jaba, Jero Jaba Jati	202	Anggar kasih, medangsia
6	Panyarikan	Buni Tegal	250	Buda Cemeng Langkir
7				

Sumber: statistic Desa adat Kuta 2001

2.4 Kondisi Sosial Ekonomi Kuta

Pembangunan perekonomian Bali dan Kuta khususnya kini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pariwisata adalah sebagai leading sektor yang memberikan berbagai peluang bagi masyarakat untuk berkiprah atau beraktivitas pada bidang tersebut. Beberapa tolok ukur riil yang biasanya digunakan dalam suatu studi untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat yang terutama adalah: (1) Peningkatan pendapatan per kapita, atau dalam mengukur kemakmuran wilayah maka yang digunakan adalah produk Domestik regional Bruto

(PDRB); (2) tingkat kepemilikan tempat tinggal yang layak; (3) kepemilikan barang-barang mewah di luar kebutuhan primer; dan (4) kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan dan perjalanan wisata/tour, serta (5) tingkat pemenuhan dalam masalah-masalah sosial budaya lainnya. Pertumbuhan pariwisata yang demikian pesat ini hingga sekarang memberikan peningkatan perekonomian masyarakat Kuta yang berarti juga secara otomatis merupakan peningkatan pendapatan masyarakat di atas rata-rata.

Perkembangan kepariwisataan memberikan corak mata pencaharian masyarakat Kuta yang benar-benar berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Pada tahap pertama perkembangan home stay, masyarakat beramai-ramai beralih dari petani dan nelayan menjadi pengusaha *home stay*. Untuk pengembangan home stay dibutuhkan lahan yang cukup banyak, maka ladang dan kebunpun menjadi *home stay*. Dalam hal ini banyak petani penggarap kehilangan pekerjaannya, karena pemilik tanah ada yang menjual tanahnya untuk membangun hotel dan gedung-gedung lainnya. Demikian juga berdiri banyak warung, toko dan sejenis art shop, yang menjual berbagai kebutuhan wisatawan. Muncul pula jasa transportasi, pemandu wisata (*guide*), dan lainnya yang merupakan sebuah *multiplying effect* atau efek penggandaan modal dalam pariwisata.

Dari informasi masyarakat setempat diketahui bahwa pada awalnya penduduk di daerah Kuta bermata pencaharian sebagai petani, sebagian lagi bekerja sebagai nelayan dan sebagian lagi bekerja sebagai pedagang serta bekerja pada kerajinan emas dan perak. Setelah Kuta diperkenalkan sebagai salah satu daerah yang layak dikunjungi dengan pantainya yang indah serta sun setnya yang indah, maka lambat laun daerah Kuta berkembang sangat pesat menjadi daerah pariwisata. Para petani yang mula-mula menggarap lahannya di sawah, kini beralih menjadi pedagang, pengusaha penginapan, pengusaha rumah makan, beberapa anggota masyarakat yang pada mulanya sebagai nelayan, kini dengan berkembangnya pariwisata beralih menjadi pengusaha jukung untuk mengantar wisatawan ke laut berwisata.

2.5 Kondisi Sosial Budaya

Aktivitas sosial budaya untuk masyarakat Kelurahan Kuta hampir sama dengan desa-desa/kelurahan lainnya yang ada di Bali. Penggerak utama seluruh aktivitas sosial budaya yang tercermin dalam adat dan agama Hindu di lakukan oleh

lembaga yang tidak asing lagi di Bali yang di sebut dengan desa adat, yang dipimpin oleh seorang bendesa adat. Pada tingkat yang paling bawah dari desa adat, disebut Banjar Adat, yang dipimpin oleh kelihan Adat. Baik desa adat maupun banjar adat masing-masing memiliki lingkup kesatuan yaitu desa/banjar adat dan dinas. Desa adat dan banjar adat membatasi lingkup kesatuannya berdasarkan adat dan kesatuan secara genealogis, sedangkan desa/banjar dinas membatasi lingkup kesatuannya secara administratif.

Dengan berkembangnya kepariwisataan di Kuta maka banyak penduduk dari luar desa dan luar Bali mencari pekerjaan dan tinggal menetap di Kuta. Berdasarkan pembatasan yang tersebut di atas, maka bentuk dan wujud dari organisasi banjar dan Desa Adat Kuta akan tetap berbeda dengan struktur dari organisasi banjar dan desa dinas akan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan sosial dan kemasyarakatan di Kelurahan Kuta juga dibedakan atas adat dan dinas. Penduduk asli Kuta termasuk dalam kedua keanggotaan baik adat maupun dinas. Sedangkan bagi penduduk pendatang hanya sebatas administratif kedinasan. Perbedaan ini karena pada penduduk asli memiliki kegiatan sosial budaya dan tanggung jawab religius terhadap keterikatan-keterikatan sebagai warga desa asli. Muncul juga beberapa organisasi sosial lainnya yang membantu dan melengkapi sistem organisais yang sudah ada, seperti : organisasi kepemudaan, wanita dan organisasi lainnya di bidang kepariwisataan, misalnya Unit Pengelolaan Pantai Desa Adat Kuta, Unit Pengelolaan Pasar Seni Desa Adat Kuta, Persatuan Peselancar, Organisasi Penyelamat Pantai/Balawista Badung, Sekeha Kesenian, dan secara menyeluruh dikoordinasikan oleh Lembaga Pemberdayaa Masyarakat (LPM) Kuta, sampai pada pengelolaan retribusi lokal Kuta yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Sebagai salah satu daya tarik dari kunjungan wisatawan ke Bali adalah mereka ingin melihat keunikan tradisi dan agama Hindu yang ada di Bali. Terjadi hubungan yang kausal jika antara perkembangan kepariwisataan dikaitkan dengan pelestarian dan peningkatan pelaksanaan kehidupan tradisi dan keagamaan tersebut. Kenyataan inilah yang menyiratkan bahwa Bali memang tepat menetapkan model kepariwisataan yang berdasarkan dan berjiwakan kebudayaan. Sampai saat ini tradisi yang masih tetap berkembang dan tumbuh subur di lingkungan masyarakat Kuta, berupa pelaksanaan tata upacara daur hidup (*life cycle*), dengan tata cara upacara

keagamaan baik pada pemujaan keluarga di rumah-rumah tinggal, dan dadia soroh klen, serta pelaksanaan yang semakin marak dan terarah di pura pemujaan Kahyangan Tiga (Puseh, Desa, Dalem). Kenyataan yang sangat mudah dipahami, terkait dengan peningkatan pendapat masyarakat sebagai akibat dari pariwisata, maka bangunan tempat ibadah (pura, *sanggah/merajan*) semakin diperbaiki dengan gaya arsitektur yang lebih bagus dan kuat, serta kuantitas pelaksanaan upacara besar semakin banyak dan sering. Semua ini merupakan rasa syukur masyarakat dan sebagai nilai tabunngan plus yang terkait dengan hukum 'karma pahala' dan konsep 'yadnya' atau pengorbanan dengan menirukan konsep ekonomi, pengorbanan yang sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Begitulah sebuah teori fungsional, dalam masalah penerapan kehidupan sosial budaya di Bali dan Kuta khususnya, bahwa tolong menolong sebagai wujud nyatanya, dan lebih abstrak lagi dalam konsep persembahan yakni adanya 'yadnya' sebagai korban persembahan guna mendapatkan berkah yang lebih banyak dari Yang Maha Kuasa dengan sebutan *Ida Sanghyang Widi Wasa*. Desa Adat Kuta memiliki 6 barong yang memiliki pemaksan masing-masing, yakni Barong di banjar Pande Mas, Banjar Tegal, barong di Puri Satria Dalem Kaleran dan satu lagi berupa barong landung (lanang-istri) yang pemaksannya dari banjar Segara. Pemaksan ini tidak jumlahnya tidak mesti berasal dsari banjar di mana barong tersebut berada, tetapi hanyalah berdasarkan kemauan hati.

Tiap-tiap barong memiliki odalan masing-masing. Di samping odalan, semua barong biasanya ngelaang setiap tahun sekali (sasih keenem, sekitar Bulan Desember) secara bersama-sama. Hal in merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan. Desa Adat Kuta memiliki 4 kuburan (setra) yakni setra kauh lokasinya di banjar segara, setra kangin berlokasi di banjar tegal, setra alit (khusus untuk anak-anak sebelum remaja) dan setra khusus keluarga Puri Satria Dalem Kaleran berlokasi di banjar anyar. Seperti daerah-daerah di desa adat lainnya di Bali, biasanya di samping setra terdapat Pura Dalem dan Meraja Pati. Di Desa Adat Kuta hanya memiliki 2 Pura Dalem yakni dalem Tunon khusus keluarga Puri Satria dalem Kaleran dan Dalem Kahyangan. Bagi setra yang tidak memiliki pura dalem seperti setra alit dan setra kauh, biasanya masyarakat hanya bersembanhyang pada pohon pule yang sudah dianggap keramat yang hidup di areal setra tersebut. Bagi warga banjar pengempon pura, mempunyai tanggung jawab penuh terhadap

pelaksanaan kegiatan di pura tersebut. Upacara di Pura dilakukan setiap enam bulan sekali dengan bergilir diantara pengempon banjar. Misalnya di Pura Segara yang berkewajiban melaksanakan upacara adalah Banjar Segara dan banjar adat Tebasari. Jika pada piodalan yang sekarang yang mendapat kewajiban adalah banjar segara, maka pada enam bulan berikutnya adalah yang berkewajiban melaksanakan prosesi upacara adalah banjar Teba Sari. Demikian selanjutnya setiap enam bulan sekali secara bergiliran. Bagi banjar yang pada saat odalan tidak mendapat giliran, maka anggota banjar tersebut datang bersembahyang ke pura hanya pada saat hari odalan. Demikian juga warga masyarakat lainnya yang ingin bersembahyang dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap prosesi upacara, maka mereka juga akan datang pada saat hari upacara. Mereka datang hanya bersembahyang, setelah sembahyang akan langsung pulang. Khusus di lokasi pasar seni, ada juga sebuah pura yang disebut pura melanting. Penyungsungunya adalah semua pedagang yang beragama hindu di pasar seni tersebut. Setiap hari nampak penuh dengan canang sari karena para pedagang biasanya setelah membuka kiosnya akan bersembahyang dulu di pura dan di depan kios tempat mereka berdagang.

Pura ini juga memiliki odalan sendiri dan semua biaya upacara ditanggung sepenuhnya oleh desa adat. Disamping pura-pura di atas, masing-masing banjar adat juga memiliki pura yang ada di bale banjar masing-masing. Yang bertanggung jawab sepenuhnya pada pura di masing-masing banjar adalah banjar yang bersangkutan. Termasuk juga biaya untk ngodalin (mengadakan upacara) sepenuhnya merupakan tanggung jawab banjar setempat. Untuk biaya ini biasanya di ambil dari kas banjar. Kas banjar dikumpulkan dari iuran masing-masing anggota banjar yang besarnya bervariasi dari Rp 5000, - hingga Rp 15.000, -, tidak ada aturan secara pasti. Hal ini sepenuhnya dikelola oleh banjar adat setempat. Di samping upacara odalan, setiap Purnama (bulan penuh) masyarakat di Desa Adat Kuta selalu melaksanakan upacara yang lebih besar dari biasanya yang dilakukan di desa adat lainnya di Bali. Ini sudah berlangsung sejak tahun 1993. Dari informasi masyarakat setempat bahwa ada dua alasan dilaksanakannya upacara ini, yakni di samping memang tulus untuk berbakti mengucapkan terima kasih atas berkah yang didapatkan oleh Hyang Kuasa kepada umatnya, juga sebagai faktor penarik wisatawan untuk menikmati atraksi budaya yakni upacara agama Hindu di Bali. Semua keluarga yang beragama Hindu memiliki merajan. Ada merajan yang

disungsung oleh lebih dari satu keluarga. Disamping merajan, nampak pula bahwa pada masing-masing rumah memiliki “penunggun karang” dan Padma sana”. Geria, sebagai tempat sulinggih ada dua buah yakni Geria dauh Kutuh dari warga Pasek dan Geria Tegeh yang pendetanya dari warga Brahmana. Kedua Geria tersebut memiliki banyak tukang banten. Tukang banten ini biasa melayani warga setempat untuk membuat banten dalam pelaksanaan upacara. Di samping melayani keluarga-keluarga, juga banyak permintaan dari pengusaha (bukan beragama Hindu) untuk membuat banten untuk pelaksanaan upacara pada tempat usahanya. Karena banyaknya permintaan maka nampaknya para tukang banten sangat sibuk, sehingga dengan bekerja membuat banten, mereka tidak sempat lagi mencari pekerjaan lain untuk menambah penghasilan, karena membuat banten ini sudah merupakan pekerjaan pokok sebagai pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Para tukang banten ini lebih sibuk lagi pada hari-hari rainan besar agama Hindu seperti : Tumpek Landep, Purnama, Tilem, dan Odalan Rambut Sedana sebagai hari suci untuk Dewa-dewi kemakmuran. Wilayah Desa Adat Kuta hampir sama dengan Kelurahan Kuta, hanya satu banjar yakni banjar Abian Base masuk ke lingkungan wilayah desa adat Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan kota Denpasar. Kelurahan Kuta memiliki masyarakat yang multi etnik. Bahkan warga atau etnik Tionghoa diperkirakan sudah menempati daerah tersebut sejak ratusan tahun yang lalu. Anggota warga Tionghoa ini terdiri atas 64 KK, mengelompokkan diri menjadi satu kelompok warga yakni kelompok Darma Semadi merupakan salah satu kelompok banjar yang anggotanya semua warga Tionghoa. Ada warga negara asing 20 orang dan yang lainnya WNI. WNI ini sebagian besar warga atau suku Bali yang beragama Hindu yakni 7758 orang. Suku lainnya antar lain : Jawa, Lombok Sumbawa, Flores, Sumatra, Manado dan lain sebagainya. Dari berbagai suku tersebut, tercatat 1322 orang beragama Islam, 525 orang beragama Kristen, 331 orang beragama Budha.

Seperti disebutkan di atas bahwa Desa Adat Kuta terdiri atas 13 banjar. Banjar adalah merupakan kesatuan sosial atas dasar ikatan wilayah. Masing-masing banjar dikepalai oleh seorang kelian banjar. Yang menjadi anggota di banjar adat ini adalah semua warga yang sudah menikah. Jika mereka baru melaksanakan perkawinan, maka tiga bulan setelah menikah mereka resmi menjadi anggota banjar adat. Astika (1985) mengatakan bahwa di Bali ada yang menggunakan pemesanan atau ada yang menggunakan KK (kepala keluarga). Bagi anggota banjar yang

suaminya sudah meninggal atau sudah menjanda mereka tidak menjadi anggota banjar penuh. Mereka hanya dikenakan iuran wajib sebagai anggota banjar yang besarnya bervariasi perbulan yang diambil setiap bulan pada saat sangkepan banjar. Anggota banjar ini akan dilanjutkan nanti setelah anaknya yang lakilaki menikah. Organisasi yang dikenal dengan nama sekaa juga dijumpai di Desa pekraman Kuta. Sekaa yang menurut Geertz (1989:89) secara harfiahnya berarti “menjadi satu”, adalah suatu kelompok sosial dibentuk berdasarkan kriteria tunggal dan eksklusif, kriteria keanggotaan dicurahkan untuk mencari tujuan sosial tertentu dan biasanya agak khusus, misalnya keagamaan, politik, ekonomi atau apa saja. Sekaa juga diartikan sebagai suatu kelompok (perkumpulan atau kesatuan sosial yang memiliki tujuantujuan khusus tertentu. Dasar keanggotaannya umumnya sukarela (Astika, 1985). Berdasarkan penggolongan tersebut, dapat dikemukakan bahwa di Desa Adat Kuta ada satu sekaa jemaah kuil, yakni pemaksan tapakan barong. Perkumpulan sukarela yaitu sekaa teruna, sekaa gong, sekaa wayang, sekaa angklung, sekaa pesantian, sekaa arisan dan PKK. Di Desa Adat Kuta ada 12 STT. STT merupakan lembaga sosial yang bersifat tradisional terutama bergerak di bidang adat dan agama. Selain STT, terdapat pula di masing-masing banjar sekaa gong dan sekaa shanti. Di samping sekaa di masing-masing banjar ada juga sekaa atau kelompok di luar tersebut yakni sekaa angklung di Br. Jaba Jero dan gender. Sekaa yang berhubungan dengan pengairan dan pertanian saat penelitian ini sudah tidak ditemukan lagi. Perubahan ini terjadi skitar tahun 60-70an, setelah berkembangnya pariwisata di daerah Kuta. Tanah pertanian beralih fungsi menjadi toko-toko, perumahan hotel dan sejenisnya sehingga saat ini subak sebagai suatu organisasi tradisional pengelola pengairan tidak ditemukan lagi di Desa Adat Kuta. Sekaa nelayan yang dulu biasa membawa jukung ke laut mencari ikan, kini berubah fungsi tidak masih mencari ikan, tetapi digunakan untuk keperluan wisatawan yang ingin berwisata ke laut dengan menggunakan jukung.

Ada beberapa anggota masyarakat memiliki gender. Ada 20 gender. Gender biasanya digunakan untuk menggiring prosesi upacara yaitu ngaben, *mesangih* (potong gigi) dan juga kadang-kadang ada yang menggunakan dalam upacara odalan di hotel-hotel. Gender ini ada yang dimiliki secara perorangan dan ada juga lebih dari satu orang. Di samping menggiring upacara ada juga pemilikan gender hanya sekedar menyalurkan *hoby*. Kesenian dalam hubungannya dengan prosesi upacara

berkembang baik. Dalam mengiringi prosesi upacara agama di masing-masing banjar ada kelompok mesanti yang anggotanya terdiri atas bapak-bapak dan ibu-ibu. Masing-masing banjar memiliki gong. Gong (gambelan) merupakan syarat mutlak dalam mengiringi upacara terutama upacara di Pura-pura. Dengan demikian maka masing-masing banjar terdapat kelompok (sekaa gong). Di samping itu, kesenian santi (mekidung) dan ada juga yang dilakukan sendiri yakni seni gender. Sanggar seni tari juga ditemui di sana. Seni tari lebih banyak bersifat sosial, karena di samping melengkapi kegiatan upacara juga dipertunjukkan untuk kegiatan pergaulan, misalnya, ulang tahun banjar, mudamudi dan lain-lain. Mereka tidak mau menari di hotel atau di tempat wisata dengan alasan di samping honorinya kecil, katanya mereka tidak mau terikat dengan waktu, karena umumnya yang menari tersebut rata-rata sedang sekolah.

Sekaa topeng ada 1 group. Topeng ini juga biasanya ditarikan dalam mengiringi upacara di pura. Ada juga digunakan dalam mengiringi kegiatan upacara manusia yadnya seperti pernikahan, potong gigi dan upacara ngaben. Jika topeng dipertunjukkan di Pura sebagai pengiring upacara, maka itu semua diatur oleh ayah (bersifat sosial, tanpa di bayar). Tetapi jika memang diundang untuk kegiatan manusia yadnya, ada yang dibayar, ada juga hanya sekedar diberikan tidak menggunakan tarif tertentu. Ada 3 group wayang dan satu group topeng. Dalang dari 3 group ini adalah group wayang dari mangku Swera, group wayang dari mangku Tama dan satu group dari anak agung Aji dari banjar Temacun. Wayang biasanya dipentaskan saat upacara keagamaan yang dilaksanakan masyarakat desa adat Temacun. Wayang biasanya dipentaskan saat upacara keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Desa Adat Kuta. Di samping untuk melengkapi prosesi upacara keagamaan, group wayang ini juga dipentaskan dengan secara komersial di lingkungan Desa Adat Kuta juga di luar lingkungan Desa adat. Jadi dari uraian di atas, dapat disimpulkan Desa Adat Kuta memiliki potensi kebudayaan yang amat kaya. Sebagian besar melibatkan anggota banjar laki-laki, kelompok-kelompok kesenian ini dapat berkembang, karena dilakukan lebih banyak dalam mengikuti dan sebagai pelengkap upacara keagamaan.

Transformasi budaya, dalam hal ini, sarat dengan kontestasi tanda tanpa henti, yaitu tanda dari budaya lokal dan budaya global. Kontestasi tanda turistik, komersial, dan kapitalistik ini disadari oleh tokoh-tokoh desa adat, sehingga sejak

tahun 2001, tampak perubahan drastis dalam pelaksanaan ritual keagamaan *melasti* atau upacara penyucian alat-alat suci upacara sebelum memasuki *Nyepi* dan tahun baru *Isaka*. Simbol-simbol ritual diusung secara lengkap dari pura menuju segara (sebutan laut sebagai 237 sumber mata air suci). Selama ritual berlangsung, areal upacara dipagari dengan tombak dan bendera panji-panji adat, sehingga para turis yang memakai bikini tidak diizinkan lewat atau masuk. Bahkan, instrumen gong lengkap dan tari sakral Rejang Dewa mengiringi prosesi *Melasti*, hingga menjadi *melasti* yang terlengkap di Bali. Situasi magis dalam prosesi Pasupati Barong Singa dari Puri Satria Dalem mengingat warga pada ruang budaya atau *karang desa* Kuta. Secara niskala atau religio-magis, krama menyebut ruang budaya dengan *wewidangan* Kuta. Sepanjang perjalanan dari Pura Dalem Tunon, para *sadeg* (Baca: pelaku trans magis) mencari titik-titik posisi magis yang dulunya merupakan tempat-tempat untuk kuburan, tempat suci, dan bekas pohon besar.

Representasi identitas mendapatkan ruang dan waktunya pada momen-momen ritual, khususnya ritual yang melibatkan trans para *Sadeg*. Hal ini memberikan representais kultural generatif kepada generasi muda Kuta di samping kebiasaan mereka meniru gaya mode pakaian yang turistik. Dewa Sarma Kaling. Br. Jaba Jero sedang mendampingi seorang *sadeg* yang sedang kerawuhan dalam perjalanan balik dari Pura Dalem Tunon melewati Pantai Kuta menuju Puri Satria Dalem. Wajah-wajah histeris pun tampak pada muka para *Sadeg* yang sedang menangis seperti sedang menangiisi ruang budaya desa adat atau karang desa yang telah berubah total. Seperti temuan Fashri (2007: 105-109), simbol memang kuat disebut sebagai instrumen dominasi atau penanda dominasi dan, sebaliknya kekalahan tetapi kontrolnya ada dalam fungsi kesadaran. Kontestasi simbol di Kuta juga merupakan bagian dari penanda dan aspek pariwisata sebagai modal budaya dan budaya pariwisata itu sendiri. Bila masyarakat lokalnya 239 *common sense*, mereka akan dinyatakan kalah atau terpinggir. Berikut digambarkan kembali pertemuan ruang dan waktu tradisional, modern dan lokal yang menjadi tempat sirkulasi kehidupan kawasan pariwisata, di mana terjadi diaspora tanda turistik sebagai mode gerak kapitalistik global, semakin nyata dan menguat terus. .

Dengan adanya kompresi atau pemampatan ruang dalam usaha pencapaian kepentingan atau tujuan-tujuan progresif, perang tanda, dan diaspora tanda turistik yang selama ini oleh masyarakat lokal hanya bisa menyebutnya dengan kegamangan,

kesimpang-siuran, perang merek, yang semuanya memang sebuah ambivalensi kapitalisme global. Bikini yang selama ini hanya dilihat sebagai penanda kehadiran perempuan tentunya menyimpan kekuatan penanda kapital modern yang menembus dimensi global karena diterima global sebagai penanda ketidak-telanjangan, '*free past to the beach*', dan penanda diaspora tanda turistik dalam studi ini. Penyebutan *pasih* bikini merupakan sebuah penyadaran dalam proses mengangkat representasi budaya masyarakat lokal, yang masih begitu arif menolerir dominasi tanda dan ruang kapital pariwisata, seperti halnya bagaimana sebutan *pasih* perahu sejak sebelum masa kolonial, akhirnya harus masih kuat dipakai sampai sekarang dalam rangka politik identitas dan menetralsir kegamangan atas dominasi kawasan turistik terhadap ruang budaya desa adat, dengan diaspora tanda turistik kapitalistik global. Sehingga melihat harapan beberapa tokoh masyarakat, bisa digambarkan posisi netral kehidupan kawasan pariwisata yang diharapkan 240 bisa memposisikan masyarakat lokal dengan konsensus dan kendali kebijakan pemerintah yang seimbang dan proporsional, dengan figurasi skema pada gambar di bawah.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal penting terkait dengan penelitian “Proses Mengglobal Wilayah Perkotaan Berbasis Wisata, (studi kasus: Wilayah perkotaan Denpasar-Kuta)” diantara adalah sebagai berikut:

1. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keragaman budaya. Juga menunjukkan terjadinya dinamika dan pengaruh globalisasi. Salah satu yang menunjukkan adalah di Pulau Bali.
2. Wisata merupakan salah satu kegiatan yang mendapat pengaruh globalisasi, yang terwujud dalam industri wisata.
3. Desa Adat merupakan kesatuan sosial dan masyarakat dalam lingkup administratif .
4. Desa Adat (Kuta) sebagai lembaga tradisional otonom, komunitas budaya tradisional, kesatuan masyarakat hukum adat, dan identitas kolektif masyarakat Bali, mengalami banyak perubahan fisik dan transformasi sosial budaya dalam kehidupan masyarakat di dalamnya.
5. Lokasi Desa Adat Kuta sangat strategis sebagai daerah pariwisata. Memiliki pantai yang berpasir putih, dan berhadapan langsung dengan matahari terbenam (sun set), sehingga para wisatawan dapat langsung menikmati keindahan ini. Letaknya tidak jauh dari pusat Kota Denpasar, hanya 12 Km dan 11 km. dari Kota Propinsi serta pusat perkantoran.
6. Desa Adat Kuta terdiri atas 7 banjar dinas, yaitu : (1) Jaba Kuta, (2) buni Kuta, (3) tegal Kuta, (4) Pande Kuta, (5) Pengabetan Kuta, (6) Temacun Kuta dan (7) Pelasa Kuta.
7. Hubungan Kelurahan dan Desa Adat Kuta, secara historis merupakan pengaruh kerajaan dan penjajahan kolonial Belanda, yang mewarisi hubungan desa adat dan desa dinas hingga berstatus kelurahan. Kelurahan Kuta mewilayahi tiga desa adat, yaitu; Desa Adat Kuta, Desa Adat Legian, dan Desa Adat Seminyak.

8. Secara umum semua orang Bali (Hindu) adalah bagian dari Desa adat, karena hampir semua manusia Bali menjadi salah satu atau lebih anggota Desa adat.
9. pada awalnya penduduk di daerah Kuta bermata pencaharian sebagai petani, sebagian lagi bekerja sebagai nelayan dan sebagian lagi bekerja sebagai pedagang serta bekerja pada kerajinan emas dan perak. Setelah Kuta diperkenalkan sebagai salah satu daerah yang layak dikunjungi dengan pantainya yang indah, maka lambat laun daerah Kuta berkembang sangat pesat menjadi daerah pariwisata. Para petani yang mula-mula menggarap lahannya di sawah, kini beralih menjadi pedagang, pengusaha penginapan, pengusaha rumah makan dan dibidang pariwisata lainnya.
10. Aktivitas sosial budaya untuk masyarakat Kelurahan Kuta hampir sama dengan desa-desa/kelurahan lainnya yang ada di Bali. Penggerak utama seluruh aktivitas sosial budaya yang tercermin dalam adat dan agama Hindu di lakukan oleh lembaga yang tidak asing lagi di Bali yang di sebut dengan desa adat, yang dipimpin oleh seorang bendesa adat.